

**SISTEM UPAH BURUH PANEN PADI DALAM PERSPEKTIF
KEMASLAHATAN DAN Keadilan (STUDI KASUS
DI KELURAHAN JAWI-JAWI KECAMATAN
BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA
SULAWESI-SELATAN)**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Islam (S.E) Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
JUSMUNANDAR
NIM : 90100115113
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jusmunandar
NIM : 90100115113
Tempat/Tgl Lahir : Kampung Baru, 02 Februari 1998
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : "Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Kemaslahatan dan Keadilan (Studi Kasus di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan)"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran sendiri

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Samata Gowa , September 2020

penulis


Jusmunandar
NIM: 90100115113

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus I Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax 864923
Kampus II Jl. H.M. Yasin Limpo Romangpolong - Gowa ■ 424835,
Fax 424836

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul **Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Kemaslahatan dan Keadilan (Studi Kasus di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan)** yang disusun oleh **Jusmunandar**, NIM: 90100115113, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, bertepatan dengan 24 Jumadil Akhir 1441 H, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam.

Samata-Gowa, Maret 2020

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
Sekertaris : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M. Si
Penguji I : Prof. Dr. H. Mukhtar Luthfi, M.Pd.
Penguji II : Akramunnas, S.E., M.M
Pembimbing I : Mustafa Umar, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Nurfiah, S.H.I., M.E.I

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP. 19661130 199303 1 003

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr...Wb..

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Yang Maha Kuasa. Hanya atas berkatnya Rahmat-Nya penulis dapat mengerjakan skripsi ini yang berjudul “Sistem Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Kemaslahatan dan Keadilan (Studi Kasus di Kelurahan Jawi-jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi-Selatan)”

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak terutama Ayah **Jumadda** dan Ibu **Saenab** selaku orang tua tercinta, yang sungguh penulis tak mampu membalas setiap pengorbanannya selama ini, yang telah mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk kesuksesan anaknya, pada kesempatan yang baik ini, penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abustani Ilyas. MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Ahmad Efendi, S.E, M.M, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar.

4. Bapak Akramunnas, S.E, M.M, selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Mustafa Umar, S.Ag., M,Ag. dan Ibu Dr. Nurfiah, S.H.I., M.E.I, selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan masukan sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Bapak Prof. Dr. H. Mukhtar Lutfi, M.Pd. dan Bapak Akramunnas, S.E, M.M, selaku peguji yang dapat meluangkan segenap waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sampai skripsi ini selesai dengan baik.
7. Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang secara konkrit memberikan bantuan baik langsung maupun tak langsung.
8. Para Pimpinan Kantor Kelurahan Jawi-jawi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. Hal yang sama juga penulis sampaikan kepada para buruh panen dan pemilik sawah di Kelurahan Jawi-jawi yang telah membantu melakukan wawancara dari penulis. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan dari Allah Swt
9. Teman-Teman dan sahabat-sahabat angkatan 2015, terkhusus pada jurusan Ekonomi Islam serta alumni Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar yang memberikan banyak motivasi, bantuan dan menjadi teman diskusi yang baik bagi penulis.

10. Sahabat terbaikku Mirwana, Ayu pausia dan Rahmayanti yafi yang selalu memberikan motivasi, menemani, membantu dan tidak pernah lelah memberikan semangat hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
11. Seluruh keluarga besar penulis terutama kakak-kakak saya yang telah memberikan banyak dukungan dari segi apapun. dan juga kepada Sahabat sekaligus Senior saya Khusnul Khatima yang telah memberikan banyak sekali dukungan, nasehat dan arahan serta selalu menyempatkan diri mendengarkan segala keluh kesah penulis saat mengerjakan skripsi ini.
12. Semua keluarga penulis, teman-teman, dan berbagai pihak yang namanya tidak dapat dituliskan satu per satu terima kasih telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Akhirnya penulis panjatkan do'a untuk seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga atas bantuan dan amal baiknya mendapat imbalan dari Allah Swt. Semoga Skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun penulis berikutnya, dan juga pembaca dimasa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Samata Gowa , Februari 2020

Jusmunandar
NIM: 90100115113

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	8
E. Kajian Pustaka	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	21
A. Definisi Upah	21
1. Pengertian upah	21
2. Jenis-Jenis Upah	22
3. Penggolongan Upah.....	23
B. Definisi Kemaslahatan.....	24
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	24
2. Jenis-Jenis <i>Maslahah</i>	26
3. Sifat-sifat <i>Maslahah</i>	29
4. Syarat-syarat Penerapan <i>Maslahah</i>	30
C. Definisi Keadilan.....	31
1. Keadilan Dalam Pengupahan	31
2. Asas-asas Dalam Pengupahan Yang Berkeadilan	33
3. Prinsip Keadilan dalam Pengupahan	34
D. Sistem Upah Dalam Islam	35
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	35
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	36
3. Jenis-Jenis <i>Ijarah</i>	38
4. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	38
5. Prinsip-Prinsip Upah Dalam Islam	39
E. Definisi Buruh.....	41
F. Kerangka Konseptual	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46

E. Pengujian Keabsahan Data	47
F. Teknik Analisis Data	48
G. Instrumen Penelitian.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
B. Karakteristik Informan.....	55
C. Sistem upah Buruh Panen Padi di Kelurahan Jawi-jawi	57
D. Analisis Sistem Pengupahan Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Kemaslahatan	60
E. Analisis Sistem Pengupahan Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Kemaslahatan	66
BAB V HASIL PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	88



ABSTRAK

Nama : Jusmunandar
NIM : 90100115113
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Kemaslahatan dan Keadilan (Studi Kasus di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan)

Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan dan bagaimana analisisnya menurut perspektif kemaslahatan dan keadilan. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa sistem pengupahan dan untuk mengetahui dalam perspektif kemaslahatan dan keadilan sistem upah tersebut di Kelurahan Jawi-jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi-selatan.

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan Sosiologis dan normatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung kepada para informan, serta pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan buruh panen padi di Kelurahan Jawi-jawi belum dapat dikatakan memiliki unsur kemaslahatan yang nyata atau masih menduga-duga karna sistem pengupahan yang diterapkan masih mengandung unsur ketidakjelasan akan kuantitas upah yang diterima, kadang kala terjadinya pemberian upah yang merugikan buruh. Sistem ini juga belum sepenuhnya mengandung unsur keadilan karena dengan sistem pengupahan seperti ini masih adanya pemilik sawah yang memberi upah yang tidak sesuai dengan kadar kerja dan hasil panen buruh.

Kata kunci : Sistem upah buruh, kemaslahatan, keadilan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian merupakan sebuah faktor yang sangat penting dan berpengaruh ditengah kehidupan masyarakat. Berbicara mengenai ekonomi sudah pasti salah satunya membahas tentang sumber-sumber ekonomi, baik sumber primer, seperti pertanian, perindustrian, perdagangan, dan tenaga manusia (jasa) maupun sumber sekunder, seperti pariwisata, gaji, dan sarana transportasi. Kedua sumber tersebut tidak bisa lepas dari pelaku ekonomi, yaitu manusia. Melalui tenaga manusia sumber-sumber tersebut dapat dijalankan dan dirasakan manfaatnya baik dalam bentuk barang ataupun jasa dikarenakan manusia yang mempunyai kemampuan untuk memproduksi barang, bercocok tanam, melakukan transaksi jual beli dan sebagainya.¹

Sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk bermasyarakat yang senang berkumpul dan berkelompok, satu sama lainnya saling membutuhkan. Sebagai makhluk ekonomi, manusia bertujuan mencari kenikmatan sebesar-besarnya dan menjauhi ketidaknyamanan sebisa mungkin. Oleh karena itu, manusia cenderung untuk selalu berusaha mencapai kualitas hidup yang lebih baik.² Dalam kehidupan manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk memenuhi semua kebutuhannya manusia dituntut untuk bekerja. Baik bekerja yang diusahakan maksudnya ialah bekerja atas usaha sendiri, modal

¹Armansyah Waliam, “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perpektif Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 5, No. 2, 2017, h. 266.

²Ika Novi Nur Hidayati, “Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Az Zarka*, Vol. 9, No. 2, 2017, h.185.

sendiri dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan bekerja pada orang lain ialah bekerja dengan bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusnya, karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut. Pekerjaan bagi manusia merupakan suatu kebutuhan hidup, karena dengan bekerja seseorang itu dapat mandiri serta dapat memenuhi hidupnya dan keluarganya.³

Dalam kehidupan bermasyarakat, disadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kaitannya dengan hal itu, al-Qur'an selain memberi tekanan yang sangat besar terhadap pentingnya bekerja, juga dengan jelas menunjukkan bahwa manusia diciptakan di muka bumi untuk bekerja demi kehidupannya. Dalam hubungan kerja, satu pihak ada yang sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut buruh dan akan mendapatkan kompensasi berupa upah, serta sebagai pihak yang menyediakan pekerjaan yang disebut majikan. Dalam literatur fiqh dinamakan sewa menyewa jasa tenaga manusia, yang disebut akad *ijārah al-‘amal* yaitu ijarah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu.⁴

Telah dijelaskan dalam Qs. Al-Thalaq: 65/6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَى ﴿٦﴾

³Saprida, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa. Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 5, No. 1, 2018, h. 38.

⁴Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Az Zarqa*, Vol. 9, No. 2, 2017, h.185.

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Point penting yang ingin dikemukakan dari ayat ini adalah, kata *ajr (ujur)* merupakan hak bagi pekerja dan kewajiban bagi orang yang mempekerjakan seseorang. Sampai-sampai, untuk seorang ibu yang telah di thalaq suaminya berhak menerima upah susuan walau terhadap anaknya sendiri dari suaminya. Demikian juga kalau suaminya menyewa ibu susuan lain.

Berkaitan dengan kata *fa'tuhunna ujurahunna* pada ayat diatas, Muhammad Ali Ash-Shabuni seorang ulama yang berasal dari Suriah mengatakan maka menjadi kewajiban ayah untuk membayar upah susuan (*al-radha'at*). Argumentasi yang dikembangkannya adalah karena anak-anak yang lahir tersebut dinasabkan kepada ayah.⁵

Manusia sebagai tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangatlah penting. Keberadaan tenaga kerja tidak boleh begitu saja dikesampingkan yaitu tetap harus diperhatikan kesehatan dan kesejahteraan. Hal yang tidak bisa lepas begitu saja dari tenaga kerja adalah upah. Penentuan upah merupakan salah satu penentu efisien atau tidaknya kerja seorang tenaga kerja. Dimana masalah upah selalu menjadi dilema bagi para pekerja dan

⁵Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 160.

pengusaha. Pengaturan upah yang berlandaskan prinsip keadilan Selalu diinginkan oleh semua pihak dan mendatangkan kemaslahatan dalam pengupahan tersebut.⁶

Suatu bentuk keadilan dalam pengupahan merupakan hal yang sangatlah penting, dijelaskan bahwa keadilan memiliki arti yaitu mempersamakan antara yang satu dengan lainnya dari segi nilai maupun ukuran, sehingga tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Abbas al-Akadd mengatakan bahwa persamaan yang baik ialah keadilan yang didalamnya tidaklah terdapat unsur kezaliman. Sedangkan kemaslahatan dapat diartikan mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan, menurut al-Ghazali masalah yaitu suatu bentuk usaha didalam mengambil nilai-nilai manfaat dan menafikkan nilai-nilai kerusakan. Dimana hal ini dilakukan untuk menjaga tujuan syariat begitupun dalam hal pengupahan yang harus diperhatikan apakah hal tersebut memang mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak sehingga tidak adanya yang merasa dirugikan.⁷

Islam sangatlah menghargai profesionalisme kerja dalam bentuk upah yang didasari pada keahlian dan manfaat oleh pekerja kepada perusahaan atau pemberi kerja. Terdapat dua prinsip yang harus diperhatikan dalam menentukan upah pekerja, yaitu: prinsip keadilan dan kecukupan, akan tercapai ketika upah yang diberikan sudah mencukupi kebutuhan dan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja.⁸ Oleh karena itu hal yang mesti diterapkan dalam pengupahan yaitu tercapainya asas kemaslahatan. Maksud kemaslahatan disini

⁶Yetniwati, "Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan", *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1, 2017, h.82.

⁷Andi Iswandi, "Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam", *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, 2014, h. 20.

⁸Nur Mardiah, "Islam dan Perburuhan: Pembagian Kerja, *Safety Networking* dan Masalah Pada Sistem Pengupahan di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 9, No. 2, 2018. H. 196.

yaitu bagaimana sehingga pengupahan yang dilakukan pada pekerja dapat mendatangkan manfaat bagi para pekerja dan keluarganya serta berusaha menghindari segala hal yang kemungkinan akan merusak sehingga tidak adanya kerugian yang terjadi antara kedua belah pihak.

Sistem pengupahan pada buruh seharusnya tidaklah terjadi kerugian antara masing-masing pihak, pengupahan harus sesuai dengan norma yang telah ditetapkan. Tetapi pada tataran praktisnya yang sering terjadi dilapangan yaitu adanya ketimpangan dan banyak penyimpangan, dan muncul menjadi permasalahan yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang mereka terima.

Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat di Kelurahan Jawi-jawii Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Dimana sebagian besar masyarakatnya merupakan seorang petani, banyak dari mereka yang memiliki lahan pertanian berupa sawah, yang setiap kali memasuki musim panen padi mereka harus mempekerjakan buruh, para pekerja atau buruh ini melakukan tugasnya yaitu memotong padi (*massangki*), yang dimana pengupahannya dari masa kemasa tetap menggunakan cara yang sama yakni sistem pengupahan dengan memberikan gabah basah kepada setiap buruh di hari akhir panen, pengupahan seperti ini telah dilakukan sejak lama dan hampir semua menggunakan sistem pengupahan tersebut sekalipun tidak ada akad yang mengikatnya, tetapi seakan-akan telah terjadi sebuah akad kesepakatan diantara mereka. .

Banyaknya upah yang diperoleh para buruh dihitung dari sistem pengupahan harian dimana telah ditentukan bahwa seorang buruh yang bekerja penuh dalam satu hari maka akan diberi upah dua baskom gabah basah. sistem pengupahan seperti ini dibenarkan selama adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Tapi jika dilihat dari sisi lain sistem pengupahan seperti ini tentu mengandung ketidakjelasan akan kuantitas upah para buruh. Sebab upah gabah tersebut apabila sudah di pabrik maka akan terjadi penyusutan, maka antara buruh satu dengan yang lainnya akan terjadi perbedaan, bisa saja ada yang tingkat produktivitasnya lebih tinggi justru memperoleh hasil yang lebih sedikit dari gabah yang telah dipabrik tersebut ataupun sebaliknya, sehingga terjadinya aspek ketidakadilan. sementara hasil yang mereka dapatkan dari pekerjaan ini digunakan untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Sebab sebaik-baiknya upah adalah upah yang berkeadilan dan tidak adanya kezaliman atau kerugian yang dialami antara kedua belah pihak. Dan juga dapat mendatangkan manfaat bagi mereka sehingga tercapainya kemaslahatan bersama.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik lebih lanjut untuk meneliti mengenai sistem pengupahan buruh padi dan menganalisisnya dalam perspektif kemaslahatan dan keadilan dan menjelaskannya dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Kemaslahatan dan Keadilan (Studi Kasus di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana mekanisme pengupahan buruh panen padi di Kelurahan Jawi-jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana perspektif kemaslahatan terhadap pengupahan buruh panen padi di Kelurahan Jawi-jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan?
3. Bagaimana perspektif keadilan terhadap pengupahan buruh panen padi di Kelurahan Jawi-jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan yang terjadi di Kelurahan Jawi-jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Sistem pengupahan buruh panen padi di Kelurahan Jawi-jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan.

- c. Untuk mengetahui dan menganalisis Sistem pengupahan buruh panen padi dalam perspektif kemaslahatan dan keadilan di Kelurahan Jawi-jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan.

2. Kegunaan penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi teori dalam pelaksanaan penelitian-penelitian selanjutnya.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan pemahaman dalam proses studi mahasiswa di jurusan Ekonomi Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan agar ruang lingkup pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas dan fokus untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dimana penulis memfokuskan penelitian ini hanya pada sistem pengupahan buruh panen padi dalam perspektif Kemaslahatan dan keadilan.

2. Deskripsi Fokus

Sistem upah adalah kebijakan ataupun strategi yang menentukan kompensasi atau bayaran yang akan diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka, dimana sistem upah ini akan ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan pemberi kerja.

Buruh panen padi adalah orang-orang yang bekerja dengan memberikan jasanya kepada pemilik sawah dan kemudian mendapatkan upah.

Kemaslahatan yang berasal dari kata *maslahah* adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak, *maslahah* merupakan sebuah konsep penting dalam pengembangan ekonomi Islam. sepanjang sejarah para ulama senantiasa menempatkan *maslahah* sebagai sebuah prinsip utama dalam syariah. *Maslahah* bukanlah hukum tapi merupakan tujuan dari hukum itu sendiri. Dengan mematuhi hukum syariah merupakan sebuah jalan untuk mencapai *maslahah*.

Keadilan dalam pengupahan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dalam memberi kompensasi atau imbalan kepada pekerja agar terjadi kesamaan antara yang satu dengan yang lainnya dari segi nilai maupun ukuran, sehingga hal tersebut tidak berat sebelah dan tidak ada perbedaan satu sama lain. Sehingga mereka memperoleh hak mereka secara layak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.

Dari penjelasan secara konseptual diatas maka diketahui bahwa yang dimaksud dengan sistem upah buruh panen padi dalam perspektif kemaslahatan dan keadilan (studi kasus di Kelurahan Jawi-jawi Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan) adalah sebuah penelitian mengenai bagaimana sistem pengupahan atau pemberian kompensasi kepada para buruh panen padi di daerah tersebut. Selain itu, peneliti ingin menganalisa praktek yang terjadi ditinjau dari perspektif kemaslahatan dan keadilannya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sebuah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang dilakukan di seputar masalah yang diteliti. Dengan demikian,

peneliti mendapat rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding dalam menyusun skripsi ini. Beberapa penelitian yang mendukung dan menjadi dasar penelitian yang terkait dengan penelitian ini antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan Yuni Hidayatun Nisa dan M. Khairul Hadi Al-Asy'ari pada sebuah jurnal dengan judul “Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember). Dalam hasil penelitiannya bahwa pembagian hasil atau upah yang diterima buruh tani di Dusun Mandigu memiliki beberapa model pengupahan, tergantung dari kesepakatan buruh tani dengan pemilik lahan. Ada empat sistem yang biasa digunakan dalam pengupahan yaitu sistem betonan, borongan, sambatan, dan maro. Dari keempat sistem tersebut, masyarakat Mandigu lebih memilih sistem betonan karena sistem tersebut juga relevan dengan konsep islam dengan adil, saling menerima, dan hubungan mitra kerja yang baik. Dimana sistem betonan merupakan sistem dimana upah yang didapatkan dari pembagian hasil panen yaitu 4:1 dengan keterangan jika hasil panen 5 kwintal maka 4 kwintal untuk pemilik lahan dan 1 kwintal untuk orang yang melakukan beton.⁹
2. Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Saprida dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Prambatan Kecamatan Abad Kabupaten Pali”. Dalam hasil penelitiannya bahwa, Pada dasarnya dalam pelaksanaan upahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam, akan tetapi ada ketidakjelasan mengenai jumlah upah serta waktu

⁹Yuni Hidayatun Nisa dan M. Khairul Hadi Al-Asy'ari “Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember)”, *Jurnal Istiqro*, Vol. 5, No. 1, 2019.

pembayaran upah. Dalam hal ini tentu ada pihak yang merasa dirugikan yakni pekerja. Seperti pelaksanaan upah harian yang belum jelas berapa jumlahnya dan waktu pembayarannya. Padahal dalam muamalah hal tersebut harus jelas. Oleh karena itulah diharuskan adanya ijab qabul antara keduanya, dan adanya persetujuan mengenai hal-hal apa saja yang berkenaan dalam transaksi yang akan dilakukan.¹⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Ayu Lestari dan Siti Aisyah dalam sebuah jurnal yang berjudul “Upah Tenaga Kerja Lepas Kebun Sawit Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Desa Pasar Kembang Kab. Indragiri Hilir)”. Dalam hasilnya menjelaskan bahwa Pelaksanaan *Ujrah* dalam pengelolaan perkebunan sawit di Desa Pasar Kembang RT 004 RW 003 bila di lihat dari segi perjanjiannya tidak dilakukan secara tertulis melainkan hanya secara lisan saja. Sehingga apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan dalam kerja maka kedua belah pihak tidak mempunyai landasan untuk bukti. Dalam perjanjian di awal juga tidak menentukan batas waktu pelaksanaan sehingga sewaktu-waktu salah satu pihak dapat memutuskan kerja secara sepihak. Untuk upah bagian tergantung dari apa yang kita kerjakan dari hasil kebun. Untuk upah pemangkasan, pengendalian pemupukan, pembuatan saluran air dan lain-lain telah di tentukan berdasarkan yang telah kita kerjakan. Setelah penulis melakukan penelitian ternyata sistem pengupahan tenaga kerja kebun

¹⁰Saprida, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa. Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 5, No. 1, 2018.

sawit sudah sesuai dengan syariah Islam, sudah sesuai dengan rukun dan sayarat Ujah.¹¹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Wahyuni dalam sebuah jurnal yang berjudul “Analisis Sistem Pengupahan “Bawon” Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Petani Di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)”. Dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa sistem pengupahan “bawon” merupakan sebuah sistem pengupahan pada pertanian padi yang dimulai dengan adanya kesepakatan kerja, dimana buruh tani akan melakukan pekerjaan tertentu dan akan mendapatkan upah yang berupa gabah sebesar 20% dari total hasil panen dan akan didapatkan ketika selesai memanen hasil tanamnya nanti. Alasan buruh tani (penggarap lahan) masih menggunakan sistem pengupahan *bawon*, karena nilai gabah bagi buruh tani lebih berharga dari pada uang, disamping itu adanya jaminan pekerjaan pada masa tanam berikutnya dan nilai upah yang didapat lebih besar dibandingkan dengan sistem pengupahan tetap harian ataupun borongan. Sedangkan alasan pemilik lahan masih menggunakan sistem pengupahan *bawon*, karena sistem pengupahan *bawon* memiliki tingkat risiko yang rendah, selain itu kualitas kerja buruh juga lebih bagus dibandingkan dengan sistem pengupahan tetap, dan yang

¹¹Novi Ayu Lestari dan Siti Aisyah “Upah Tenaga Kerja Lepas Kebun Sawit Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Desa Pasar Kembang Kab. Indragiri Hilir)”, *Jurnal syari'ah*, Vol. 5, No. 2, 2017, h. 98.

terpenting terjalinnya ikatan sosial yang kuat antara pemilik lahan dan penggarap lahan.¹²

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Krisnarini, Musa Hubeis, dan Ma'mun Sarma dalam sebuah jurnal yang berjudul “Analisa Upah dan Kesejahteraan Pekerja Industri Kecil Menengah Pakaian Jeans XYZ di Pondok Aren, Tangerang”. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi cara pandang para pekerja terhadap pentingnya upah yaitu lama masa kerja, usia, dan posisinya didalam perusahaan. Walaupun masing-masing pekerja merasakan adanya ketidakpuasan pada beberapa bagian upah dan komponen lainnya yang diberikan oleh perusahaan, tetapi dapat terlihat bagian yang dirasakan tidak puas adalah berbeda. Hal tersebut dipengaruhi juga oleh lamanya masa kerja, faktor usia dan kedudukan pekerja pada perusahaan. Dari kajian diperoleh hasil skor rata-rata tingkat kepuasan pekerja terhadap upah dan komponen yang telah diterima pekerja sebesar 2,79, berarti hubungan antara upah dan kepuasan mendekati puas. Akan tetapi hasil dari analisa korelasi rank spearman dengan korelasi -0,160, dapat diartikan bahwa upah pokok dan komponennya yang telah diberikan perusahaan belum dapat mencerminkan tingkat kepuasan pekerja.¹³

¹²Dwi Wahyuni, “Analisis Sistem Pengupahan “Bawon” Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Petani di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)”, *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan*, Vol. 2, No. 2, 2016.

¹³Dwi Krisnarini, Musa Hubeis, dan Ma'mun Sarma, “Analisa Upah dan Kesejahteraan Pekerja Industri Kecil Menengah Pakaian Jeans XYZ di Pondok Aren, Tangerang” *Jurnal MPI*, Vol. 3, No. 2, 2008.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Armansyah Waliam dalam sebuah jurnal yang berjudul “ Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam” menjelaskan bahwa Jika suatu upah disepakati diberikan sesuai tempo masa tertentu (hari/minggu/bulan) maka harus diserahkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Karena didasarkan prinsip keadilan dan akhlak maka batasannya adalah upah riil yang berada diantara upah minimum dan maksimum dengan tetap memperhatikan kebutuhan pekerja serta kemampuan perusahaan. Serta diberikan berdasarkan prinsip keadilan dan kelayakan yang mengharuskan mampu memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan, serta keterjaminan kesehatan para pekerja dan keluarganya secara baik dan terhormat sesuai kebiasaan yang berlaku, sehingga upah tidak hanya sebatas materi (dimensi duniawi) belaka tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akherat.¹⁴
7. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Mardiah dalam sebuah jurnal yang berjudul “Islam dan Perburuhan: Pembagian Kerja, *Safety Networking* dan Masalah Pada Sistem Pengupahan di Indonesia”. Dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa hak-hak pekerja yang telah diatur dalam hukum positif dan hukum Islam telah berupaya memberikan perlindungan terhadap pekerja seperti hak untuk mendapatkan upah yang layak dan dilindungi oleh negara serta agama. Hanya saja aturan tersebut masih memuat beberapa hal diskriminatif seperti komponen kebutuhan hidup layak (KHL) yang seharusnya berpedoman pada survei pasar yang tidak

¹⁴Armansyah Waliam, “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perpektif Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 5, No. 2, 2017.

lagi menjadi syarat utama dalam menetapkan upah, melainkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi nasional. Dari aspek pembagian kerja dan upah yang diberikan oleh perusahaan, belum mencerminkan kesesuaian antara posisi kerja dengan upah yang diterima dalam perspektif hukum Islam.¹⁵

8. Penelitian yang dilakukan oleh M. Dilif Lailun Ni'am, Bambang Suyadi, dan Hety Mustika Ani, dalam sebuah jurnal yang berjudul "Pengaruh Upah Terhadap Motivasi Kerja Karyawan (Studi Kasus Pada Karyawan UD. Pakem Sari, Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember)". Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa upah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja karyawan. Tingkat besaran upah yang diberikan pada karyawan yaitu berdasarkan jenis batik dan jumlah motif batik, dimana hal tersebut akan membuat karyawan termotivasi untuk menghasilkan kain batik dengan perolehan upah yang besar agar segala kebutuhan atau keinginan masing-masing karyawan akan terpenuhi. Adapun kontribusi variable upah terhadap variable motivasi kerja karyawan adalah sebesar 56,4% dan sisanya 43,6% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti pengakuan, penghargaan, kebutuhan karyawan, hubungan kerja,

¹⁵Nur Mardiah, "Islam dan Perburuan: Pembagian Kerja, *Safety Networking* dan Masalah Pada Sistem Pengupahan di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 9, No. 2, 2018.

prestasi kerja, lingkungan kerja, jaminan pekerjaan serta status dan tanggung jawab karyawan.¹⁶

9. Penelitian yang dilakukan oleh Septi Wulan Sari dalam sebuah jurnal yang berjudul “Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan Hukum Ekonomi Islam”. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pada intinya sistem pengupahan yang diterapkan oleh pengusaha bengkel las di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung kepada pekerjanya yaitu sistem upah jangka waktu utamanya upah secara harian dan sistem borongan. Fakta yang ditemukan setelah meneliti keadaan dilapangan ternyata seorang kuli dengan upah harian dan kuli produk etalase, knopi dan produk lainnya selain sintetis dan harmonica belum memenuhi standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung yaitu Rp. 1.273.050. Berkaitan dengan sistem pengupahan berdasarkan Hukum Ekonomi Islam para pengusaha bengkel telah menjalankan prinsip dalam islam tersebut yakni diberitahukan upahnya dan memberikan upah tepat waktu. Selain itu telah memenuhi syarat keadilan, kelayakan, dan kebajikan. Memang standar yang ditetapkan ketiga kriteria tersebut diatas tidak disebutkan nominal. Namun dalam Islam jika keduanya telah saling rela dan pengupahan

¹⁶M. Dilif Lailun Ni'am, “Pengaruh Upah Terhadap Motivasi Kerja Karyawan (Studi Kasus Pada Karyawan UD. Pakem Sari, Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember)”, *Jurnal Pendidikan ekonomi*, Vol. 12, No. 2, 2018.

tersebut sesuai dengan kebiasaan masyarakat maka bisa disimpulkan telah sesuai dengan norma dalam syariat Islam.¹⁷

10. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Nuraini dalam sebuah jurnal yang berjudul “Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengupahan buruh tersebut menggunakan sistem upah borongan. Dalam menghitung besar kecilnya upah yang harus dikeluarkan berdasarkan pada perhitungan banyaknya barang yang harus diborong perkapal tanpa adanya standarisasi upah yang diterima oleh buruh. Jangka waktu pembayaran upah dilaksanakan sebulan sekali kemudian upah dibagikan langsung oleh bendahara pelabuhan. Menurut Ekonomi Islam, pengupahan yang dilakukan ini belum memenuhi hukum syariah, karena dalam syariat Islam setiap majikan berkewajiban untuk menetapkan standar upah bagi para pekerjanya.¹⁸

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas dapat dilihat persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai sistem pengupahan terhadap buruh atau pekerja. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya hanya memfokuskan pada sistem pengupahan dalam pandangan islam namun dalam penelitian ini peneliti mengangkat masalah yang baru mengenai aspek kemaslahatan dan keadilan dalam pengupahan buruh panen

¹⁷Septi Wulan Sari, “Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan Hukum Ekonomi Islam”, *AHKAM*, Vol. 4, No. 1, 2016.

¹⁸Putri Nuraini, “Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2018.

padi di daerah Kelurahan Jawi-jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi-Selatan.

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Yuni Hidayatun Nisa dan M. Khairul Hadi Al- Asy'ari Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember)	Penelitian ini juga membahas mengenai sistem pengupahan	Terdapat perbedaan pada subyek maupun tempat yaitu penelitian terhadap buruh tani yang berbeda dengan penelitian ini.
2.	Saprida Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Prambatan Kecamatan Abad Kabupaten Pali	Penelitian ini juga membahas mengenai sistem pengupahan terhadap buruh panen padi	Penelitian ini bukan hanya fokus meneliti mengenai sistem upah buruh pada bidang persawahan saja, tetapi juga mencakup pada pengupahan dalam pembukaan lahan, penyadapan karet dan perkebunan sawit. Yang akan dianalisis dengan teori fikih muamalah.
3.	Novi Ayu Lestari dan Siti Aisyah Upah Tenaga Kerja Lepas Kebun Sawit Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Desa Pasar Kembang Kab. Indragiri Hilir)	Menganalisis konsep upah yang berlaku di daerah tersebut dan bagaimana pengupahan tersebut dalam pandangan Islam	Perbedaan terhadap subyek penelitian yaitu mencakup sistem upah terhadap para pekerja lepas kebun sawit yang berbeda dengan penelitian ini
4.	Dwi Wahyuni Analisis Sistem Pengupahan “Bawon” Pada Pertanian Padi	Penelitian ini sama-sama mencakup sistem pengupahan yang dilakukan	Perbedaannya terdapat pada subyek, tempat, dan teori analisis

	(Studi Kasus Pada Petani Di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)	petani padi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat	yang digunakan dalam penelitian
5.	Dwi Krisnarini, Musa Hubeis, dan Ma'mun Sarma “Analisa Upah dan Kesejahteraan Pekerja Industri Kecil Menengah Pakaian Jeans XYZ di Pondok Aren, Tangerang”.	Penelitian ini juga membahas mengenai sistem pengupahan	Pada penelitian ini memfokuskan pada pengupahan terhadap pekerja industri kecil menengah dengan melihat dari aspek kesejahteraan terhadap pekerja
6.	Armansyah Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam	Penelitian ini juga membahas mengenai upah dalam prinsip keadilan	Perbedaan terhadap tempat dan subyek dalam penelitian
7.	Nur Mardiah Islam dan Perburuhan: Pembagian Kerja, <i>Safety Networking</i> dan Masalah Pada Sistem Pengupahan di Indonesia	Penelitian ini juga mencakup mengenai sistem pengupahan dalam prinsip masalah terhadap buruh	Penelitian ini mencakup sistem pengupahan secara luas atau tidak memfokuskan pada pengupahan buruh panen padi
8.	M. Dilif Lailun Ni'am, Bambang Suyadi, dan Hety Mustika Ani Pengaruh Upah Terhadap Motivasi Kerja Karyawan (Studi Kasus Pada Karyawan UD. Pakem Sari, Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember)	Penelitian ini juga mencakup sistem pengupahan	Perbedaannya yaitu penelitian ini memfokuskan pada pengaruh upah yang diberikan terhadap motivasi kerja para karyawan
9.	Septi Wulan Sari Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan Hukum Ekonomi Islam”.	Penelitian ini juga membahas mengenai sistem pengupahan	Perbedaannya terdapat pada subyek maupun obyek yaitu pada penelitian ini mencakup pengupahan pada pekerja di bengkel las serta bukan hanya ditinjau dari hukum islam tetapi

			juga dari upah minimum kabupaten
10.	Putri Nuraini Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat Di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam	Pada penelitian ini juga meneliti mengenai sistem upah buruh dalam perspektif ekonomi Islam	Perbedaannya yaitu pada subyeknya yaitu penelitian ini menganalisis sistem pengupahan buruh bongkar muat dan bukan pada buruh panen padi



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Definisi Upah*

1. Pengertian Upah

Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atau buruh atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan sebuah imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi, tidak seperti gaji yang jumlahnya relative tetap, besarnya sebuah upah dapat berubah-ubah. Konsep upah biasanya dihubungkan dengan proses pembayaran bagi tenaga kerja lepas.¹⁹

Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²⁰

- a. Soemarso, menyatakan bahwa upah adalah imbalan kepada buruh yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan

¹⁹Vethzal Rivai Zainal, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 554.

²⁰Septi Wulan Sari, "Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan Hukum Ekonomi Islam", *AHKAM*, Vol. 4, No. 1, 2016, h. 124

fisik dan biasanya jumlahnya ditetapkan secara harian, satuan, atau borongan.

- b. Mulyadi, menyatakan bahwa upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh pegawai pelaksana (buruh).
- c. Diana dan Setiawati, menyatakan bahwa upah diberikan atas dasar kinerja harian, biasanya praktek ini ditemukan pada pabrik. Upah adakalanya juga didasarkan pada unit kerja yang dihasilkan.

Dapat disimpulkan bahwa Upah merupakan sebuah kompensasi yang dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh pegawai.²¹

2. Jenis-Jenis Upah

Menurut buku Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Upah dapat berupa uang, barang atau jasa. Tentang jenis-jenis upah dijelaskan dalam dasar-dasar perburuhan yaitu sebagai berikut:²²

- a. Upah Nominal, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja yang berhak secara tunai sebagai imbalan pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.
- b. Upah nyata, yaitu uang yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seorang pekerja yang berhak. Upah ini ditentukan oleh daya beli upah

²¹Lijan Poltak Sinambela, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2016), h. 237.

²²Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Az Zarka'*, Vol. 9, No. 2, 2017, h.199.

tersebut yang akan banyak tergantung dari besar kecilnya jumlah uang yang diterima dan besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

- c. Upah hidup, yaitu upah yang diterima pekerja relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokok melainkan juga kebutuhan sosial dan keluarganya.
- d. Upah minimum, yaitu upah terendah yang akan dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja.
- e. Upah wajar, yaitu upah yang secara relative dinilai cukup wajar oleh oleh pengusaha dan pekerja sebagai imbalan jasa-jasanya.

3. Penggolongan Upah

Terdapat 3 penggolongan upah, yaitu sebagai berikut:²³

a. Upah sistem waktu

Dalam sistem waktu, besarnya upah ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Besarnya upah sistem waktu hanya didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan dengan prestasi kerjanya.

b. Upah sistem hasil (output)

Dalam sistem hasil, besarnya upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter, dan kilogram. Besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya.

²³Vethzal Rivai Zainal, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, h. 554.

c. Upah sistem borongan

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan cukup rumit, lama mengerjakannya, serta banyak alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya.

B. Definisi Kemaslahatan

1. Pengertian *masalah*

Maslahah menurut bahasa berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalahat*, yaitu berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Manfaat adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut, sedangkan kerusakan adalah keseluruhan akibat yang merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerusakan tersebut. *Maslahah* adalah apa yang kembali kepada kokohnya kehidupan manusia dan kehidupan yang sempurna. Menarik kemaslahatan dan membuang hal-hal yang merusak dalam kehidupan bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat.²⁴

²⁴Rizal Fahlefi, "Implementasi Masalahah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah", *JURIS*, VOL. 14, No. 2, 2015, h. 226.

Pemaknaan *maslahah* menurut ulama ushul fiqh yaitu sebagai berikut:²⁵

- a. Al-Ghazali, sebagai pelopor ulama syafi'iyah, dalam kitabnya yang berjudul *al-mustashfa*, al-Ghazali memaknai *maslahah* sebagai usaha didalam mengambil nilai-nilai manfaat dan menafikkan nilai-nilai kerusakan. Dimana usaha ini ditujukan untuk menjaga tujuan syariat (*maqoshid al-syariah*), yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Al-Ghazali berpendapat bahwa segala usaha yang ditujukan untuk menjaga tujuan syariat (*maqoshid al-syariah*) adalah *maslahah* atau nilai-nilai manfaat, sedangkan segala usaha yang menafikkan tujuan syariat adalah mafsadah atau nilai-nilai kerusakan.
- b. Al-Thufi, menurutnya *maslahah* dimakna sebagai *wazn* dari kata *maf alaturun* dari kata *sholaha*, yang berarti bentuk suatu materi dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kegunaannya, semisal pulpen dibuat sedemikian rupa agar dapat digunakan untuk menulis. Menurutnya, perlindungan terhadap kemaslahatan manusia merupakan sumber atau prinsip hukum paling tinggi dan paling kokoh karena ia merupakan tujuan utama dari maksud syari'ah.²⁶
- c. Al-Khowarizimi, salah satu ulama ushul fiqh hanafiyah ini memaknai *maslahah* sebagai usaha menjaga tujuan syariat dengan menafikkan

²⁵Andi Iswandi, "Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam", *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, 2014, h. 20.

²⁶Agus Hermanto, "Konsep *Maslahat* Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Thufi Dan Al-Ghazali), *AL-ADALAH*, Vol. 14, No. 2, 2017, h. 448.

mafsadah (nilai-nilai kerusakan) yang ditimbulkan oleh perilaku-perilaku manusia.

- d. Ibnu Abdi Salam, salah satu ulama syafi'iah ini memaknai *masalahah* dalam jumlah pemaknaan yang beragam, dalam karya monumentalnya *Qowaid al-Ahkam fi Masholihu al-Anam* dijelaskan bahwa *masalahah* terbagi menjadi empat jenis, yaitu hakiki yang terdiri dari kesenangan dan kelezatan, dan majazi yang terdiri dari faktor kesenangan dan kelezatan.
- e. Al-Syathibi, menyatakan bahwa *masalahah* adalah mengambil manfaat dan menolak mafsadah yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tetapi dalam rangka memelihara hak hamba.

2. Jenis-jenis *masalahah*

Pembagian *masalahah* secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. *Maslahah Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang bisa dijadikan *hujjah* dan tidak diragukan lagi penggunaannya. Dalam kasus hukum yang secara eksplisit telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadits. Kemaslahatan ini dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Maka kemaslahatan seperti ini lazim dijadikan tolak penetapan hukum.
- b. *Maslahah Mulghah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada teksnya dalam syariah, bahkan bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits. Dan menjadikan *masalahah* itu sendiri dihilangkan (*mulghah*) dan tidak

²⁷Rahmat Ilyas, "Konsep Masalahah Dalam Komsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1, No.1, 2015, h. 11.

dianggap. Kemaslahatan seperti ini dianggap batil oleh syara' dan tidak berlaku untuk menetapkan suatu hukum.

- c. *Maslahah Mursalah*, yaitu masalah yang tidak ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadits dan juga tidak bertentangan dengan kedua sumber tersebut. Atau bisa disimpulkan bahwa kemaslahatan yang tidak disebutkan ataupun disebutkan oleh dalil syari'ah. Ketika adanya suatu perkara maka syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum. Dan hakikat dari *Maslahah Mursalah* adalah semua kemaslahatan dan juga manfaat yang masuk dalam area *maqasyid syari'ah*, ketika hal tersebut tidak disyariatkan ataupun dihilangkan.

Menurut Jumhur Ulama bahwa *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber legislasi hukum dalam Islam jika memenuhi syarat sebagai berikut:²⁸

- 1) *Maslahah* tersebut haruslah "*maslahah yang haqiqi*" bukan hanya yang berdasarkan prasangka tapi merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Tetapi jika hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemadharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan bukan berdasarkan syari'at yang benar.

²⁸Hendri Hermawan Adinugraha, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2018, h. 71.

- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan suatu kemaslahatan yang bersifat umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik bagi perorangan ataupun kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- 3) Kemaslahatan tersebut tidaklah bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits baik secara dzahir atau batin. Oleh sebab itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam hal pembagian warisan, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

Asy-Syatibi membagi kemaslahatan menjadi tiga tingkatan yaitu:²⁹

- a. *Maslahah Dharurriyah*, yaitu suatu kemaslahatan yang diperoleh oleh manusia dalam bentuk terpeliharanya survivalitas hidupnya. Jika kemaslahatan tersebut tidak diperoleh, kehidupan manusia akan mengalami kehancuran. Kemaslahatan tersebut tidak akan terpenuhi, kecuali jika hukum Islam tersebut diterapkan.
- b. *Maslahah Hajiyyah*, yaitu suatu kemaslahatan yang diperoleh manusia dalam kondisi yang berkaitan dengan keringanan (*rukhsah*) yang diberikan Allah kepada manusia. Misalnya, ketika sedang melakukan puasa Ramadhan atau puasa wajib yang lain, sedangkan pada waktu

²⁹Rizal Fahlefi, "Implementasi Masalahah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah", *JURIS*, Vol. 14, No. 2, 2015, h. 227.

yang sama sedang bepergian atau sakit, maka orang tersebut diizinkan untuk membatalkan puasanya kemudian diganti pada waktu yang lain.

- c. *Maslahah Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang diperoleh oleh manusia ketika melaksanakan hukum-hukum yang berkaitan dengan sifat, ahlak dan adab. Misalnya menjaga kebersihan badan dan pakaian.

3. Sifat-sifat Maslahah

Sifat *Maslahah* secara umum terdiri atas dua macam, yaitu sebagai berikut:³⁰

- a. *Maslahah* bersifat subjektif, dalam arti setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu *maslahah* atau bukan bagi dirinya. Kriteria *maslahah* ini ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu, misalnya jika menabung bank memberi *maslahah* bagi diri dan usahanya, namun syariah tetap menetapkan keharaman bunga bank tersebut. Maka penilaian individu tentang kemaslahatan itu menjadi gugur.
- b. *Maslahah* orang perorang akan konsisten dengan *maslahah* orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep *poreto optimum*, yaitu keadaan optimal dimana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain.

³⁰Rahmat Ilyas, "Konsep *Maslahah* Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1, No.1, 2015, h. 12.

Alquran dan Sunnah telah memberikan penekanan terhadap fleksibilitas syariat islam dan memastikan kesesuaian penerapannya dalam kehidupan manusia. Dengan demikian seluruh aturan syariat islam harus sejalan dengan prinsip *maslahah* sehingga segala tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan baik dan sempurna. Perekonomian merupakan Salah satu aspek kehidupan manusia yang mendapat perhatian khusus dalam hal penerapan konsep *maslahah*, karena aktivitas ekonomi merupakan sebuah kegiatan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, maka prinsip *maslahah* dalam ekonomi Islam bukanlah sekedar kajian teori tetapi perlu untuk diimplementasikan dengan metode yang benar.³¹

4. Syarat-syarat Penerapan Maslahah

Dalam menggunakan *maslahah* sebagai *hujjah*, ulama bersikap sangat hati-hati sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal tersebut, maka para ulama menyusun syarat-syarat *maslahah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu sebagai berikut:³²

- a. Bentuk *maslahah* haruslah selaras dengan tujuan-tujuan syariat, yaitu bahwa kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya dan juga tidak menabrak garis ketentuan *nash* dan dalil-dalil lain yang *qat'i*. Dengan kata lain bahwa kemaslahatan

³¹Izal Fahlefi, "Implementasi Maslahah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah", *JURIS*, Vol. 14, No. 2, 2015, h. 225.

³²Hendri Hermawan Adinugraha, "Al- Maslahah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2018, h. 70.

tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan syariat, merupakan bagian keumumannya, bukan termasuk kemaslahatan yang *gharib*. Kendati tidak ada dalil yang mengukuhkannya.

- b. Suatu kemaslahatan tersebut berlaku universal (umum), bukanlah kemaslahatan bagi individu tertentu atau sejumlah individu. Ini mengingat bahwa *shari'at* Islam itu berlaku untuk semua manusia. Oleh karena itu, penetapan hukum atas dasar *masalahah*, bagi kalangan tertentu, seperti penguasa, pemimpin dan keluarganya tidak sah karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku bagi semua manusia.
- c. *Maslahah* itu harus hakikat, bukan dugaan. *Ahlu al-hilli wa al-aqdi* dan mereka yang mempunyai disiplin ilmu tertentu, memandang bahwa pembentukan hukum tertentu harus didasarkan pada *masalahah al-haqiqiyah*, yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan menolak bahaya pada diri mereka. Tegasnya masalahah tersebut yang rasional, maksudnya secara rasio terdapat peruntukan wujud kemaslahatan terhadap penetapan hukum.

C. Definisi Keadilan

1. Keadilan dalam pengupahan

Upah dalam perspektif Islam merupakan imbalan yang diterima seorang pekerja atas manfaat pekerjaan yang dikerjakannya dengan baik dan benar dalam bentuk imbalan materi didunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat. Islam memberikan pengertian upah lebih komprehensif karena

mencakup dimensi *duniawi* (materi atau kebendaan) dan *ukhrawi*. Adapun prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip dasar kegiatan ekonomi (*muamalah*) secara umum, terutama prinsip keadilan dan prinsip moralitas.³³

Besaran gaji atau upah dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah. Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Dalam penetapan upah, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al-Qur'an dan Hadits yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.³⁴

Dalam perjanjian tentang upah kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam segala urusan mereka. sehingga tidak terjadi tindakan zalim terhadap pihak lain dan juga tidak merugikan kepentingan sendiri. Tindakan aniaya terhadap pekerja berarti pekerja tidak dibayar atau mendapat upah secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerja sama sebagai jatah dari hasil kerja yang tidak mereka peroleh. Sementara aniaya terhadap majikan atau

³³Armansyah Waliam, "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perpekstif Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 5, No. 2, 2017, h. 268.

³⁴Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Az Zarka'*, Vol. 9, No. 2, 2017, h. 190.

pengusaha adalah mereka dipaksa oleh kekuatan industri atau kekuatan kelompok pekerja untuk membayar upah melebihi kemampuan mereka.³⁵

Dalam asal keadilan menuntut agar gaji/upah karyawan harus dibayar seimbang dengan jasa yang diberikan oleh pekerja untuk memberikan ukuran gaji yang adil, dapat dikemukakan dua macam keadilan yang harus diperhatikan, yaitu:³⁶

- a. Keadilan distributif yang menuntut para karyawan yang melaksanakan sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan, memperoleh gaji yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan hidup individu berkenaan dengan kondisi keluarganya.
- b. Keadilan harga kerja yang menuntut agar para karyawan diberikan gaji seimbang dengan jasa yang diberikan, tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang hanya menguntungkan para pengusaha.

2. Asas-asas hukum pengupahan yang berkeadilan

Terdapat beberapa Asas-asas hukum pengupahan yang berkeadilan yaitu sebagai berikut:³⁷

- a. Hak atas upah lahir setelah adanya hubungan kerja dan berakhir bila hubungan kerja berakhir.
- b. Upah terdiri dari beberapa komponen yang harus dirinci secara jelas

³⁵FORDEBI ADESI, *Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 240.

³⁶Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Az Zarka'*, Vol. 9, No. 2, 2017, h. 191.

³⁷Yetniwati, "Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan", *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1, 2017, h.93.

- c. Pemerintah harus melindungi upah pekerja
- d. Pemberian upah harus manusiawi
- e. Tidak boleh ada diskriminasi upah
- f. Keseimbangan
- g. Adanya penghargaan untuk pekerja yang lebih produktif
- h. Transparansi dalam manajemen pengupahan
- i. Para pihak yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian pihak lawan dikenakan sanksi
- j. Hak prioritas atas upah apabila pengusaha pailit
- k. Perlindungan upah yang diberikan perundang-undangan adalah perlindungan minimal
- l. Memberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat bagi *stakeholder* dalam pembuatan regulasi hukum ketenagakerjaan.

3. Prinsip keadilan dalam pengupahan

Prinsip keadilan dalam pengupahan terdapat dua pengertian yaitu sebagai berikut:³⁸

- a. Transparan dan jelas

Akad *ijarah* salah satu syarat sahnya yaitu mengenai kejelasan dalam pengupahan, baik terkait waktu pembayaran, jumlah upah yang akan diterima serta bentuk upah. Harus adanya kejelasan dan transparan dalam transaksi yang dilakukan agar terciptanya prinsip keadilan..

³⁸Armansyah Waliam, "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perpekstif Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 5, No. 2, 2017, h. 270.

- b. Proporsional yaitu upah atau imbalan yang diterima para pekerja harus sesuai dengan yang telah dikerjakannya dan tidak boleh ada seorang pekerja pun yang diperlakukan secara tidak adil. Para pekerja akan memperoleh upah sesuai dengan produktivitas dan kontribusinya dalam pekerjaan tersebut.

D. Sistem Upah Dalam Islam

1. Pengertian Ijarah

Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti 'iwa'du (ganti), Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Upah (*ujrah*) tidak bisa dipisahkan dari sewa-menyewa (*ijarah*) karena memang upah merupakan bagian dari sewa menyewa (*ijarah*), *ijarah* berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil.³⁹

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti al-'iwad atau upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.⁴⁰ *Ijarah* merupakan transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut Dr. Muhammad Syafi'I Antonio, *ijarah* adalah sebuah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan

³⁹Novi Ayu Lestari, "Upah Tenaga Kerja Lepas Kebun Sawit Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Desa Pasar Kembang Kab. Indragiri Hilir)", *Jurnal syari'ah*, Vol. 5, No. 2, 2017, h. 98.

⁴⁰Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h.80.

atas barang itu sendiri. Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.⁴¹

2. Dasar Hukum Ijarah

a. Dalam Al-Qur'an

Selain terdapat pada surah al-Thalaq, dasar hukum diperbolehkannya ijarah juga terdapat pada Qs. al-Qasash: 28/26 dijelaskan pula mengenai diperbolehkannya melakukan ijarah, yaitu sebagai berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَجْرَهُ إِنِّ خَيْرٌ مِّنِ اسْتَجْرَتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"

M. Quraish Shihab yaitu seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu al-Qur'an menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan, salah seorang dari kedua wanita itu yakni yang datang mengundangnya berkata: Wahai ayahku, pekerjakanlah dia agar ia dapat menangani pekerjaan kita selama ini antara lain menggembala ternak kita karena sesungguhnya dia adalah orang yang kuat dan terpercaya dan sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau pekerjakan untuk tugas apapun adalah orang yang kuat fisik dan mentalnya lagi terpercaya. Tidak hanya berhenti di situ, Quraish Shihab juga mengutip Ibn Taimiyah yang menegaskan pentingnya kedua sifat itu disandang oleh siapapun yang diberi tugas.⁴²

⁴¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 247.

⁴²Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 157.

Dari ayat diatas menegaskan bahwa bukan hanya seorang majikan yang berkewajiban membayar upah para pekerja tetapi seorang pekerja juga berkewajiban untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan amanah sehingga akan terciptanya dengan baik hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

b. Dalam Al-Hadits

Adapun dianjurkannya ijarah terdapat dalam hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata: Nabi SAW berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam upahnya.” (HR. Al-Bukhari).

Hadis diatas menunjukkan bahwa boleh mengambil upah atau hasil usaha berbekam dan kemudian Nabi mempraktekannya sendiri. Ulama klasik dan kontemporer berpendapat bahwa profesi bekam tidaklah dilarang, baik orang yang merdeka maupun budak, demikian juga dengan obat yang harus diminum/dimakannya.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى
الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ

Artinya:

Ahmad bin Muhammad al-Makki menyampaikan kepada kami dari Amr bin Yahya, dari kakeknya, dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw bersabda, ”setiap nabi yang diutus Allah pasti pernah mengembala kambing.” Para sahabat bertanya, “Engkau juga?” Nabi menjawab, “ya, aku pernah

mengembalikan kambing orang-orang Mekah dengan upah beberapa qirath.”⁴³

Berdasarkan hadits diatas dijelaskan bahwa seseorang boleh saja melakukan pekerjaan untuk mendapatkan upah seperti yang telah dilakukan oleh Nabi sendiri yaitu ia pernah mengembalikan kambing orang-orang mekah, yang mana pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

3. Jenis Ijarah

Dalam hukum islam ada dua jenis ijarah, yaitu sebagai berikut:

- a. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang telah disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *mustajir*, pihak pekerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.
- b. Ijarah yang berhubungan dengan sewa asset atau property, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset atau property tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

4. Rukun dan Syarat Ijarah

1. Rukun ijarah

Terdapat beberapa rukun ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- a. Pelaku akad, yaitu mustajir (penyewa), yaitu pihak yang menyewa aset dan mu`jir/muajir (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.

⁴³Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 1; Shahih Al-Bukhari 1*, (Jakarta: Almahira, 2011), h.500.

⁴⁴Harun Santoso, “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, 2015, h. 108.

- b. Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan) dan *ujrah* (harga sewa).
- c. *Sighat* yaitu *ijab* dan *qabul*.

2. Syarat *ijarah*

Adapun syarat *ijarah* yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum islam yaitu sebagai berikut:⁴⁵

a. Syarat terjadinya akad

Berkaitan dengan *aqid*, zat akad, dan tempat akad. Menurut ulama Hanafiyah, *aqid* atau orang yang melakukan akad disyaratkan harus berakal dan *mumayyis* (minimal 7 tahun), serta tidak diisyaratkan harus *baliqh*.

b. Syarat pelaksanaan

Barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad.

c. Syarat sah *ijarah*

Keabsahan *ijarah* berkaitan dengan *aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad, yaitu adanya keridhaan dari kedua belah pihak.

d. Syarat lazim

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* (batal) pada salah satu pihak.

5. Prinsip-prinsip Upah Dalam Islam

Adapun prinsip-prinsip upah dalam islam yaitu sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁵Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Az Zarka'*, Vol. 9, No. 2, 2017, h. 189.

a. Kesepakatan dan kerelaan antara pekerja dan pemberi kerja

Islam sangat melarang adanya unsur paksaan yang dapat merugikan salah satu pihak dimana hal tersebut akan mengakibatkan seseorang masuk kedalam memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil.

b. Mencukupi kebutuhan dasar

Setidaknya dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, para pekerja akan merasa diperhatikan oleh pemberi kerja sehingga terciptanya hubungan emosional yang kuat antara kedua pihak dan menciptakan loyalitas pekerja terhadap pemberi kerja.

c. Proporsional dan transparan

Upah adalah konsekuensi dari kinerja seseorang. Maka dengan demikian salah satu tolak ukur penentuan upah yang proporsional adalah yang sesuai dengan job desc yang melekat yang melekat pada tiap pekerjaan.

d. Partnership relationship

Dalam Islam hubungan antara perusahaan dengan karyawan, majikan dengan pembantu, atasan dengan bawahan merupakan hubungan partnership. Dimana keduanya saling melengkapi dengan begitu tidak ada majikan atau atasan yang merasa superior ketika berpapasan dengan bawahannya.

e. Tidak menunda hak karyawan/pekerja

⁴⁶Yuni Hidayatun Nisa, "Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember)", *Jurnal Istiqro*, Vol. 5, No. 1, 2019, h 91.

Menunda-nunda pemenuhan hak karyawan dengan cara menahan upahnya tanpa alasan yang nyata dan dibenarkan merupakan perbuatan yang zhalim. Rasulullah menganjurkan pemberian upah sesegera mungkin karena upah merupakan hak pegawai atau pekerja yang harus segera dipenuhi.

E. Defenisi Buruh

Menurut undang-undang No. 22 tahun 1957 (tentang penyelesaian perselisihan perburuhan) mendefinisikan bahwa buruh adalah mereka yang bekerja pada majikan dan menerima upah. Menurut ILO, buruh adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau badan hukum dan mendapatkan upah sebagai imbalan atas jerih payahnya menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, dengan kata lain semua orang yang tidak memiliki alat produksi dan bekerja pada pemilik alat produksi maka bisa dikatakan sebagai buruh.⁴⁷

Secara umum hak-hak pokok pekerja (buruh) dalam islam yaitu sebagai berikut:⁴⁸

- a. Pekerja berhak untuk menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak.
- b. Para pekerja tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya.
- c. Pekerja harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika ia sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu.

⁴⁷Grendi Hendrastomo, "Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh Diantara Kepentingan Negara dan Korporasi", *Jurnal Informasi*, Vol. 16, No.2, 2010, h. 4.

⁴⁸FORDEBI ADESI, *Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, h. 238.

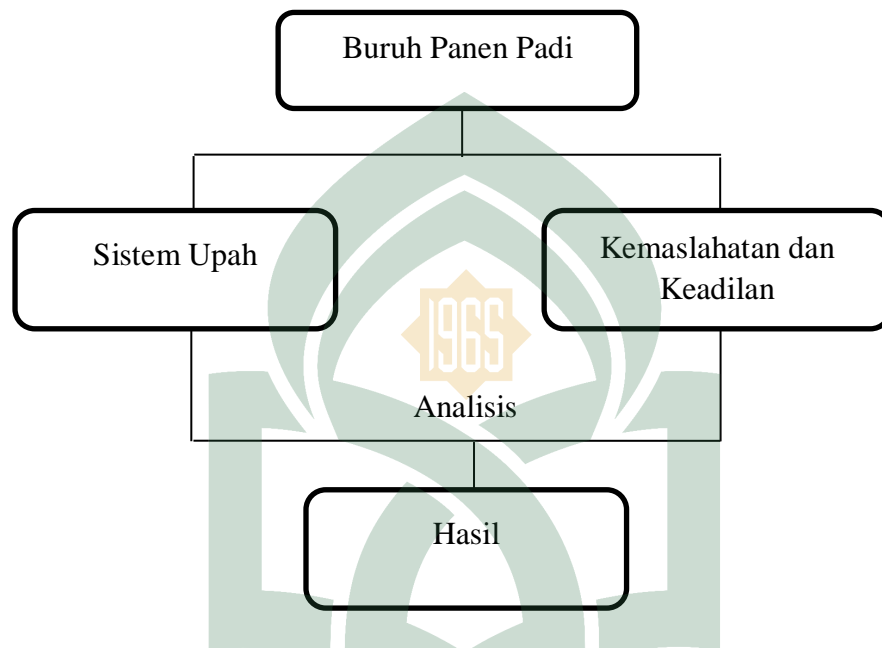
- d. Pekerja berhak menerima pembayaran pension dalam penentuan upah yang layak untuk pembayaran pension tersebut.
- e. Pekerja dan anak-anak dari pekerja berhak memperoleh sedekah dari majikan. Oleh karena itu, para majikan harus didorong untuk mengeluarkan sedekahnya (sumbangan sukarela) tersebut.
- f. Pekerja harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan.
- g. Pekerja harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan selama bekerja.
- h. Pekerja harus disediakan akomodasi yang layak agar kesehatan dan efisiensi kerja mereka tidak terganggu.
- i. Pekerja dilarang untuk dikenakan denda karena kerusakan barang-barang dan alat-alat selama waktu bekerja.

Buruh merupakan salah satu unsur pendukung dari unit produksi yang memegang peran penting dalam menghasilkan suatu produk. Berbicara tentang produksi tidak akan lepas dari konteks upah dan kebutuhan fisik minimum buruh. Dalam suatu proses produksi, buruh hanya akan menghasilkan produktivitas yang tinggi apabila keadaan fisiknya cukup memadai. Hal tersebut akan bisa tercapai apabila upah yang diterimanya dapat memenuhi fisik minimum.⁴⁹

⁴⁹Grendi Hendrastomo, "Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh Diantara Kepentingan Negara dan Korporasi", *Jurnal Informasi*, Vol. 16, No.2, 2010, h. 10.

F. *Kerangka Konseptual*

Kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu untuk mempermudah arah penelitian, agar pola pikir yang diterapkan oleh penulis dapat diterapkan dan dipahami. Adapun kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut:



Berdasarkan kerangka konseptual diatas yang telah dikonsepskan oleh penulis yaitu dalam melakukan penelitian pada buruh panen padi tentang sistem pengupahan yang digunakan, yang kemudian sistem pengupahan tersebut akan dianalisis dalam perspektif kemaslahatan dan keadilan sehingga hasil dalam penelitian ini dapat ditentukan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar ilmiah. Dengan kata lain penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana seorang individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya.⁵⁰ Dimana peneliti akan melakukan penelitian lapangan mengenai Sistem upah buruh panen padi di kelurahan jawi-jawi kecamatan Bulukumpa kabupaten Bulukumba dan bagaimana Sistem tersebut dalam perspektif kemaslahatan dan keadilan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kelurahan jawi-jawi kecamatan bulukumpa kabupaten bulukumba sulawesi selatan. Lokasi ini didasari karena di daerah tersebut melakukan pengupahan kepada para pekerja atau buruh panen padi, dan peneliti melihat adanya aspek ketidakadilan dan tidak tercapainya masalah dalam pengupahan tersebut. Peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat yang merupakan buruh panen padi di kelurahan jawi-jawi kecamatan bulukumpa kabupaten bulukumba sulawesi selatan yang bertujuan agar peneliti mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang penelitian ini.

⁵⁰Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.91.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif yaitu metode pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum islam, baik yang berasal dari alquran, al-hadits, kaidah-kaidah fikih maupun pendapat ulama. Ayat al-Quran yang membahas mengenai sistem pengupahan yaitu terdapat pada surah Al-Thalaq ayat 6 dan surah Al-Qasash ayat 26.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis yaitu metode pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat buruh panen di Kelurahan Jawi-jawi lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.

C. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan sekunder:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang di teliti atau dapat diperoleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini penulis langsung melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam

penelitian yaitu masyarakat buruh panen padi yang ada di Kelurahan Jawi-jawi kecamatan Bulukumpa kabupaten Bulukumba.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak didapat secara langsung oleh peneliti. Pada bagian ini penulis mengambil data sekunder dari laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel, internet, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

D. *Teknik Pengumpulan Data*

Dalam pengumpulan data penulis melakukan beberapa macam hal atau teknik supaya data yang di dapat sesuai dengan peristiwa apa yang sebenarnya terjadi, diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi

pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan disebut observasi. Pada tahap ini adalah tahap pertama yang penulis gunakan. Dengan mengadakan observasi menurut kenyataan dan menggambarkan secara cermat untuk mendapatkan data yang relevan. Metode observasi disini digunakan untuk mengumpulkan data lapangan, sebagai bahan untuk obyek yang akan teliti di daerah Kelurahan Jawi-jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Sulawesi-Selatan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara lansung dengan yang diwawancarai dimana

adanya percakapan dengan maksud tertentu.⁵¹ Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yaitu yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu atau yang di ajukan. Dalam kasus yang akan diteliti, peneliti akan mewawancarai langsung buruh panen padi yang terdapat didaerah tersebut.

3. Dokumentasi

merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan cara pengumpulan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber dokumen yang dipublikasikan, atau tidak dipublikasikan, buku-buku, jurnal ilmiah, Koran, majalah, website dan lain-lain.

E. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangatlah penting, sebab sebuah data dikatakan valid apabila data yang diperoleh peneliti tidak berbeda dengan data sebenarnya yang terjadi dilapangan. Maka dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi.

1. Triangulasi

Triangulasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara triangulasi teknik dan sumber data. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan wawancara, observasi,

⁵¹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana,2012), h.138.

partisipasif dan dokumentasi. Triangulasi sumber dan teori, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda.⁵²

2. Meningkatkan Ketekunan

Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan tersebut telah benar atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan juga maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat tentang apa yang diamati.⁵³

3. Member Check

Pengujian keabsahan suatu data dengan member check dilakukan dengan cara mendiskusikan kembali hasil penelitian kepada sumber-sumber data yang telah memberikan data. Data yang telah diverifikasi oleh peneliti dapat dikoreksi oleh pemberi data dari segi pandangan situasi mereka sendiri.⁵⁴

F. *Tehnik Analisis Data*

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data informan yaitu pemilik sawah dan buruh panen padi yang dilakukan dengan wawancara mendalam, kemudian hasil dari wawancara tersebut di diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (display data) dan kemudian disajikan dalam bentuk content analisis menggunakan teori-teori kemaslahatan

⁵²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cv. Alfabeta, 2008), h.117.

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 270.

⁵⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 124.

dan keadilan yang ada, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

G. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian *handphone/ tape recorder* (alat perekam) yang digunakan merangkum hasil-hasil wawancara informan dan juga digunakan untuk mengambil bukti dokumentasi peneliti, dimana setiap akan melakukan penelitian atau wawancara penulis menggunakan instrument ini untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, hal yang sangat penting yang harus diketahui adalah kondisi lingkungan yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu di Kelurahan Jawi-jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang perlu diketahui adalah kondisi geografis, demografis dan keadaan sosial ekonomi.

1. Kondisi Geografis

a. Letak Kelurahan

Lokasi yang digunakan dalam penelitian adalah Kelurahan Jawi-jawi yang berada di Kabupaten Bulukumba. Dimana Kelurahan Jawi-jawi tepatnya terletak di salah satu Kecamatan yaitu Bulukumpa. Jarak antar kelurahan ke kota letaknya cukup jauh. Berikut ini adalah jarak dari kelurahan ke kota:

Tabel 4.1: jarak dari kelurahan ke kota

No.	Uraian	Jarak	Waktu Tempuh
1.	Dari kelurahan ke Ibukota Kabupaten	50 Km	1 Jam
2.	Dari kelurahan ke Ibukota Kecamatan	10 km	15 menit

Sumber: kantor Kelurahan Jawi-jawi, 2019

b. Batas Kelurahan

Kelurahan Jawi-jawi berbatasan dengan desa/kelurahan lainnya yang masih dalam satu kecamatan. Adapun batas Kelurahan Jawi-jawi yaitu:

Tabel 4.2: batas Kelurahan

No.	Batas	Desa/Kelurahan
1.	Utara	Ballassaraja
2.	Timur	Tibona
3.	Selatan	Balangpesoang
4.	Barat	Tanete

Sumber: kantor Kelurahan Jawi-jawi, 2019

c. Luas Kelurahan

Kelurahan Jawi-jawi memiliki luas tanah sekitar 17 $\frac{1}{4}$ Ha/m², yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

Tabel 4.3: luas wilayah menurut penggunaannya

No.	Uraian	Luas Tanah
1.	Pemukiman	15 Ha/m ²
2.	Kuburan	2 Ha/m ²
3.	Perkantoran	$\frac{1}{4}$ Ha/m ²

Sumber: kantor Kelurahan Jawi-jawi, 2019

2. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Kelurahan Jawi-jawi dihuni sekitar 6.475 orang yang terdiri dari 3038 orang laki-laki dan 3437 orang perempuan dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 4312 KK. Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam table berikut:

Table 4.4: Jumlah penduduk Kelurahan Jawi-jawi menurut jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	3.437 orang
Perempuan	3.038 orang
Jumlah	6.475 orang

Sumber: kantor Kelurahan Jawi-jawi, 2019

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk 6.475 orang yang terdiri atas laki-laki 3038 orang dan perempuan 3.437 orang, hal ini berarti bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki. Jumlah penduduk tersebut merupakan penduduk dengan usia 0-75 tahun yang merupakan penduduk yang sudah dan belum menikah.

b. Mata Pencaharian

Mata Pencaharian masyarakat Kelurahan Jawi-jawi secara keseluruhan bermata pencaharian beragam, tetapi yang lebih dominan adalah sebagai petani. Adapun yang lain bermata pencaharian sebagai pedagang, PNS, Peternak, pensiunan PNS/TNI/Polri, pengusaha kecil dan menengah. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5: mata pencaharian masyarakat Kelurahan Jawi-jawi

No.	Mata Pencaharian	Persentase (%)
1.	Petani	35
2.	Pedagang dan Pengusaha	25
3.	PNS	15

4.	Pensiunan	15
5.	Usaha Lainnya	10
	Jumlah	100

Sumber: kantor Kelurahan Jawi-jawi, 2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat Kelurahan Jawi-jawi mayoritas bermata pencaharian sebagai petani.

c. Tingkat Pendidikan

Sebagian masyarakat Kelurahan Jawi-jawi belum terlalu menyadari akan pentingnya sebuah pendidikan tapi sebagian besar masyarakat yang sudah memahami mulai menyekolahkan anaknya hingga kejenjang perguruan tinggi. Namun sebagian kecil masih ada masyarakat yang tidak menyekolahkan anaknya sampai kejenjang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena kurangnya dana dan pengetahuan orang tua terhadap pentingnya pendidikan. Banyak orang tua yang hanya menyekolahkan anaknya hanya sampai ke jenjang Sekolah Dasar (SD). Berikut ini tabel jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan.

Tabel 4.6: Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

No	Uraian	Persentase (%)
1.	Belum Sekolah	15
2.	Tamat SD/Sederajat	25
3.	Tamat SMP/Sederajat	25
4.	Tamat SMA/Sederajat	20
5.	Tamat PT	15
	Jumlah	100

Sumber: kantor Kelurahan Jawi-jawi, 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan yang sedang sekolah memiliki jumlah persentase yang paling banyak. Hal tersebut membuktikan bahwa dimasa sekarang sudah banyak para orang tua yang mebyekolahkan anaknya dikarenakan mereka sudah mengetahui bahwa pentingnya sebuah pendidikan

d. Agama

Masyarakat Kelurahan Jawi-jawi memiliki satu keyakinan yaitu agama Islam. Namun, kebanyakan masyarakatnya masih kurang paham mengenai hukum-hukum Islam karena ajaran nenek moyang mereka masih melekat dalam kesehariannya.

3. Kondisi Sosial Ekonomi

a. Perumahan dan Tempat Ibadah

Masyarakat Kelurahan Jawi-jawi sebagian besar saat ini sudah memiliki tempat tinggal yang memadai dan permanen, meskipun masih ada masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal yang memadai karena faktor ekonomi yang tidak memungkinkan untuk memperbaiki rumah atau tempat tinggalnya. Dengan demikian rumah-rumah masyarakat sebagian besar sudah memadai dan permanen, hanya sebagian kecil saja yang memiliki rumah semi permanen.

Dalam melakukan ibadah, karena masyarakat Kelurahan Jawi-jawi menganut agama islam maka sudah terdapat banyak masjid yang telah dibangun didaerah tersebut.

b. Kesehatan Masyarakat

Masyarakat Kelurahan Jawi-jawi sudah mulai sadar akan kesehatan dan juga dengan didukung fasilitas kesehatan sehingga masyarakat tidak kesulitan ketika ingin memeriksakan kesehatannya. Apabila mereka ingin memeriksakan kesehatannya mereka tidak langsung berobat ke rumah sakit tetapi mereka hanya memilih berobat ke puskesmas saja. Mereka memilih berobat ke puskesmas bukan karena tidak ingin ke rumah sakit akan tetapi jarak dari desa/kelurahan ke rumah sakit cukup jauh.

Kesehatan para ibu dan balita Kelurahan Jawi-jawi juga sudah terjamin karena adanya posyandu di setiap lingkungan. Untuk pelaksanaan posyandu tersebut bidan menyelenggarakan kegiatan setiap bulannya yakni pemeriksaan atau pengukuran berat badan dan pemberian imunisasi.

B. Karakteristik Informan

Berikut ini adalah tabel yang memuat data informan yang meliputi nama, usia Pendidikan dan pekerjaan:

Tabel 4.7: Daftar informan pemilik sawah dan buruh panen

No.	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan
1.	Sudirman	40 Tahun	SMP	Pemilik Sawah
2.	Melda	43 Tahun	SMP	Pemilik Sawah
3.	Lismawati	30 Tahun	SMA	Pemilik Sawah
4.	Hara	44 Tahun	SD	Pemilik Sawah
5.	Halija	57 Tahun	SD	Buruh Panen
6.	Erna	44 Tahun	SMP	Buruh Panen

7.	Juharni	43 Tahun	SMA	Buruh Panen
8.	Harmina	44 Tahun	SMP	Buruh Panen

Sumber: Informan yang bersangkutan, 8 Desember 2019

1. Umur

Umur rata-rata para informan adaalah 30 tahun sampai dengan 57 tahun.

2. Pendidikan

Tabel diatas menunjukkan bahwa para informan pernah mengayam pendidikan meskipun banyak yang hanya lulusan SD dan SMP karena mungkin pada saat itu orang tua mereka belum terlalu paham akan pentingnya pendidikan yang berbeda dengan masa sekarang yang telah banyak kemajuan.

3. Pekerjaan

Tabel sebelumnya penulis bisa melihat bahwa informan sebanyak delapan orang, empat orang diantaranya sebagai pemilik sawah dan empatnya lagi sebagai buruh panen padi.

C. Sistem pengupahan buruh panen padi di Kelurahan Jawi-jawi

Upah merupakan harga yang dibayarkan kepada para pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan. Dalam bahasa al-Qur'an disebut dengan *ujrah*. *Ujrah* adalah sesuatu yang diberikan dalam bentuk imbalan (*al-shawab*) pekerjaan dan diterima baik didunia ataupun diakhirat. Upah yang diterima manusia diakhirat sepenuhnya menjadi hak prerogatif Allah dan dalam konteks ini disebut pahala (*ajrun*).⁵⁵

⁵⁵Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana,2015), h. 80.

Buruh merupakan para tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, dimana para tenaga kerja itu harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja yang dilakukan oleh pengusaha (majikan) yang bertanggung jawab atas lingkungan perusahaannya. Dimana tenaga kerja ini akan memperoleh upah dana atau jaminan hidup lainnya yang wajar.⁵⁶



a. Pelaksanaan Akad

Sebelum melaksanakan pekerjaan tentunya para pemilik dan buruh melakukan perjanjian terlebih dahulu atau disebut dengan akad. Dimana akan dijelaskan mengenai waktu, tempat maupun upah yang akan diterima sesuai dengan apa yang disepakati kedua belah pihak sebelum masing-masing melaksanakan hak dan kewajiban mereka.

Sudirman (pemilik sawah):

“saya biasa datang kerumah buruh untuk meminta memanen padi saya, biasa saya memanggil 7 sampai 8 orang, tergantung juga dari jadinya padi. Upahnya nanti saya kasi 2 baskom kalo dia kerja full dalam sehari, nanti dikasi kalo selesai dipabrik padi”⁵⁷

Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa para pemilik sawah dalam mengontrak buruh tetap melihat kondisi dari padi milik mereka, ketika mereka

⁵⁶Ika Novi Nur Hidayati, “Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Az Zarka*, Vol. 9, No. 2, 2017, h. 198.

⁵⁷Wawancara Pemilik Sawah, Sudirman (40 Tahun), Bulukumba, Kelurahan Jawi-jawi, 8 Desember 2019.

melihat bahwa padi yang akan dipanen banyak maka mereka akan mengontrak banyak buruh begitupun sebaliknya.

b. Pelaksanaan Pekerjaan

Setelah mengetahui waktu dan tempat maka para buruh akan memulai panen mereka yang biasanya mereka akan selesai memanen 2-3 hari, selama melakukan pekerjaan tersebut para buruh mendapatkan konsumsi yang ditanggung oleh pemilik sawah tapi alat yang mereka gunakan milik pribadi atau tidak disediakan oleh pemilik.

c. Pemberian Upah

Persoalan upah sangatlah penting karena ia memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Jika para pekerja tidak mendapat upah yang memadai, hal ini tidak hanya memengaruhi nafkahnya saja, melainkan juga daya belinya. Jika sebagian besar pekerja tidak memiliki daya beli cukup, maka hal itu akan memengaruhi seluruh industri yang memasok barang-barang konsumsi bagi kelas pekerja.⁵⁸

Pemberian upah padi kepada buruh akan diberikan pada akhir masa panen, adapun banyaknya upah yang diberikan dihitung dengan sistem harian atau berapa hari mereka dapat menyelesaikan panen tersebut. Upah akan dibayarkan ketika semua padi pemilik telah dipanen yang biasanya memakan waktu 2-3 hari yang kemudian padi akan dipabrik untuk dipisahkan dari tangkai atau istilah daerahnya (*dironto*'), setelah itu barulah upah mereka dibayarkan sesuai dari masa kerja mereka. ketika seorang buruh memanen dalam sehari full maka ia akan di beri

⁵⁸Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 197.

upah 2 baskom padi tetapi jika setengah hari maka hanya 1 baskom dan akan dihitung berapa hari mereka memanen.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai analisis pengupahan dalam perspektif kemaslahatan dan keadilan, berikut ini adalah bagan mengenai indikator dari teori tersebut dan bagaimana pelaksanaannya.

Tabel 4.8: indikator kemaslahatan dan keadilan serta pelaksanaannya

No.	Indikator	Pelaksanaan
1.	Kemaslahatan	
	1. Bentuk masalah haruslah selaras dengan tujuan-tujuan syariat	Terpenuhi
	2. Suatu Kemaslahatan tersebut harus berlaku universal (umum)	Terpenuhi
	3. Masalah itu harus hakikat, bukan dugaan	Tidak Terpenuhi
2.	Keadilan	
	1. Adil bermakna jelas dan transparan	Tidak Terpenuhi
	2. Adil bermakna proporsional	Tidak Terpenuhi

D. Analisis Sistem pengupahan buruh panen padi dalam perspektif kemaslahatan

Salah satu penerapan *masalah* yang perlu diperhatikan dalam aktivitas ekonomi yaitu terhadap sistem pengupahan buruh panen padi di kelurahan jawi-jawi yang dimana sistem pengupahannya dengan memberikan padi kepada buruh, dengan banyaknya upah ditentukan menggunakan sistem harian yang akan dibayarkan pada akhir masa panen. Upah adalah harga yang dibayarkan kepada para pekerja (tenaga kerja) atas jasanya dalam suatu produksi. Islam memiliki

beberapa ketentuan mengenai pengaturan upah. Beberapa diantaranya ialah Rasulullah Saw. telah melarang mempekerjakan pekerja tanpa menetapkan upahnya terlebih dahulu.⁵⁹

Segala aktivitas perekonomian merupakan hal yang tidak dapat terpisah dalam kehidupan manusia, sehingga prinsip *maslahah* dalam ekonomi Islam bukan hanya sekedar teori saja, tetapi perlu diimplementasikan dengan metode atau cara yang benar. Implementasi *maslahah* dapat dilihat dalam aktivitas kegiatan ekonomi yang selalu berkembang.⁶⁰

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, untuk menentukan sistem pengupahan buruh panen padi berdasarkan perspektif kemaslahatan, dimana para ulama menyusun syarat-syarat pembentukan hukum diantaranya yaitu:

- a. Bentuk *maslahah* haruslah selaras dengan tujuan-tujuan syariat

Bahwa kemaslahatan tersebut tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip dasarnya dan juga tidak menabrak garis ketentuan *nash* dan dalil-dalil yang *qat'i*. seperti halnya dalam menetapkan upah bagi seorang pekerja, hal tersebut bukanlah perkara yang mudah, seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian

⁵⁹FORDEBI ADESI, *Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 237.

⁶⁰Rizal Fahlefi, "Implementasi *Maslahah* Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah", *JURIS*, VOL. 14, No. 2, 2015, h. 225.

diri mereka. upah ditetapkan dengan cara paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun.⁶¹ Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلَمْهُ أَجْرَهُ

Artinya:

Barang siapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan upahnya. (HR. Abd al-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al- Khudri)⁶²

Berdasarkan hadits diatas kita ketahui bahwa kewajiban bagi pemberi kerja adalah membayarkan upah kepada para buruh dengan tidak melanggar atau bertentangan dari al-Qur'an dan hadits.

Harmina (buruh panen padi):

“Selama ini saya memanen padi selalu diberi upahnya kalo sudah kita panen semua dan padinya sudah dironto' (dipabrik) biasanya upahnya dibayar tergantung dari cepat atau tidaknya padi sudah di pabrik tapi selaluji saya dibayar upahku selama kerja”⁶³

Dari pernyataan buruh tersebut bahwa mereka selalu menerima upah dari para pemilik sawah ketika sudah selesai panen, cepat atau tidaknya dibayarkan upah mereka tergantung dari cepatnya padi itu selesai di pabrik. Meskipun terkadang ada yang lambat tapi upah mereka tetap dibayarkan. Maka hal ini sesuai dengan hadits diatas bahwa ketika kita mempekerjakan seseorang maka kita harus membayar upahnya sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sesungguhnya seorang buruh atau pekerja hanya berhak atas upahnya jika telah melakukan pekerjaan dengan semestinya dan telah sesuai dengan

⁶¹Ika Novi Nur Hidayati, “Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Az Zarqa'*, Vol. 9, No. 2, 2017, h. 200.

⁶²Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Juz II (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 50.

⁶³Wawancara Buruh Panen, Harmina (44Tahun), Bulukumba, Kelurahan Jawi-jawi, 8 Desember 2019.

kesepakatan, karena umat Islam terikat pada syarat-syarat antar keduanya kecuali syarat yang mengharamkan yang halal ataupun menghalalkan sesuatu yang haram. Selama para pekerja mendapatkan upah secara penuh maka tentu kewajibannya juga harus dipenuhi.⁶⁴

b. Suatu kemaslahatan tersebut harus berlaku universal (umum)

Maksudnya yaitu hal tersebut bukanlah kemaslahatan bagi individu tertentu saja atau sejumlah individu, Bersifat umum maksudnya bahwa sistem pengupahan tersebut harus mendatangkan manfaat antara kedua belah pihak bukan hanya pihak pemilik sawah yang diuntungkan dan buruh dirugikan, begitupun sebaliknya.

Harmina (buruh panen padi):

“saya pergi jadi buruh karna saya tidak punya sawah, dan upahnya bisa untuk saya makan bersama keluarga biarpun tidak cukup untuk makan dalam jangka lama tapi setidaknya bisa mengurangi pengeluaran untuk membeli beras di pasar”⁶⁵

Masyarakat memilih menjadi buruh Karena mereka berfikir bahwa hal tersebut bisa membantu ekonomi keluarga, mereka yang notabennya tidak berpenghasilan atau tidak bekerja dan hanya akan mengandalkan hasil upahnya untuk dikonsumsi setiap hari meskipun tidak dalam jangka panjang karena melihat tingkat upah yang terbilang rendah dan pekerjaan ini berdasarkan musim. Namun hal tersebut tentu mendatangkan manfaat dari kedua belah pihak karena mereka saling membutuhkan, para pemilik sawah merasa tertolong karena ada

⁶⁴Armansyah Waliam, “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perpektif Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 5, No. 2, 2017, h. 272.

⁶⁵Wawancara Buruh Panen, Harmina (44Tahun), Bulukumba, Kelurahan Jawi-jawi, 8 Desember 2019.

yang memanen padinya dan para buruh mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya.

c. Masalah itu harus hakikat, bukan dugaan.

Maksudnya yaitu kemaslahatan tersebut harus benar adanya dan bukanlah dugaan atau prasangka saja. Pembentukan hukum tertentu harus berdasarkan *masalah al-haqiqiyah*, yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan menolak bahaya dari diri mereka. Seperti halnya dalam sistem pengupahan yang dilakukan di Kelurahan Jawi-jawi yang seharusnya dapat mendatangkan manfaat seperti makna dari kemaslahatan yaitu berusaha mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan sehingga tidak adanya kerugian yang terjadi antara masing-masing pihak.. Karena dengan sistem upah tersebut para pemilik sawah harus memperkirakan apakah upah tersebut sudah pantas atau tidak, yang artinya hal tersebut bersifat menduga-duga atau bukanlah termasuk kemaslahatan yang nyata karena tidak menutup kemungkinan terjadinya kerugian bagi salah satu pihak. Dengan sistem upah seperti ini tidak dapat di pungkiri kadang kala ada seorang pemilik sawah yang semena-mena dalam memberikan upah dan tidak melihat kelayakan dari upah dan tenaga yang telah dikeluarkan para pekerja.

Erna (buruh panen padi):

“saya pernah merasa dikecewakan sama pemilik sawah, dia kasi saya upah tapi tidak sesuai, dia kasih saya padi yang lebih banyak kulitnya jadi pas saya pabrik sedikitji jadinya. Saya tidak tau dia sengaja atau tidak tapi seharusnya dia tau bagaimana perkiraan itu upah sudah baik atau tidak karna dia sebagai orang yang sudah paham masalah begitu”.⁶⁶

⁶⁶Wawancara Buruh Panen, Erna (44Tahun), Bulukumba, Kelurahan Jawi-jawi, 8 Desember 2019.

Dari pernyataan diatas bahwa didalam pemberian upah dengan sistem ini kepada buruh tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kedzaliman yang dilakukan oleh para pemilik sawah, baik itu disengaja maupun tidak, sehingga akan menimbulkan kerugian kepada pihak buruh.

Al-syatibi membagi kemaslahatan menjadi tiga tingkatan yaitu *masalah Dharurriyah*, *masalah Hajiyyah*, dan *masalah Tahsiniyah*. Namun dengan ketiga tingkatan ini maka sistem pengupahan dimasukkan dalam *masalah Dharurriyah* yaitu suatu kemaslahatan yang diperoleh oleh manusia dalam bentuk terpeliharanya survivalitas hidupnya. Jika kemaslahatan tersebut tidak diperoleh, kehidupan manusia akan mengalami kehancuran. Kemaslahatan tersebut tidak akan terpenuhi, kecuali jika hukum Islam tersebut diterapkan. Menurut Asy-syatibi Kemaslahatan ini terdiri dari lima unsur pokok yaitu Memelihara agama, jiwa, keturunan, harta benda serta akal.⁶⁷ Dari sistem pengupahan yang diterapkan di Kelurahan Jawi-jawi belum bisa dikatakan mengandung unsur masalah dharurriyah karena hal tersebut belum mampu mendatangkan manfaat dalam memelihara keturunan, karena sistem pengupahan tersebut belum mampu mendatangkan manfaat bagi buruh dan keturunannya yang artinya hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka yang tidak lama karena upah yang mereka terima bisa dikatakan rendah dan dengan pekerjaan ini yang bergantung pada musim.

Dalam mengimplementasikan *masalah* pada suatu kegiatan ekonomi memiliki ruang lingkup yang lebih luas jika dibandingkan dengan

⁶⁷Muksana pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penentuan Hukum Islam", Jurnal Justitia, Vol. 1, No. 4, 2014. H. 354.

implementasinya dalam bidang-bidang lain. *Nash-nash* yang terkait terhadap ekonomi pada umumnya bersifat global, oleh karena itu ruang gerak ijtihadnya lebih luas. Sedikitnya *nash-nash* yang menyinggung masalah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi teknis, membuka sebuah peluang besar untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengembangkan ijtihad berdasarkan prinsip *maslahah*. Berbeda halnya dengan bidang lainnya seperti bidang agama yang bersifat dogmatik. Maka prinsip *maslahah* menjadi acuan dan patokan penting dalam bidang perekonomian, apalagi jika menyangkut dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang minim dengan aturan syara' yang mana terjadi kekosongan aturan hukum.⁶⁸

E. Analisis sistem pengupahan buruh panen padi dalam perspektif Keadilan

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluknya secara zalim. Defenisi adil dalam Islam yaitu tidak mendzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.⁶⁹

Kata-kata keadilan sangat sering diulang dalam al-Qur'an setelah kata Allah dan al-ma'rifah (ilmu pengetahuan) lebih kurang seribu kali. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa suatu keadilan mempunyai makna yang sangat dalam dan urgen dalam Islam serta menyangkut segala aspek kehidupan. Oleh

⁶⁸Rizal Fahlefi, "Implementasi Maslahah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah", *JURIS*, VOL. 14, No. 2, 2015, h. 229.

⁶⁹Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 26.

sebab itu, keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan.⁷⁰

Dalam hal pengupahan, Islam menawarkan sebuah solusi yang amat masuk akal yaitu berdasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja. Menurut Islam, upah harus ditetapkan secara layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang manapun. Pekerja maupun majikan harus memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, bukan sebagai tuan dan hamba. Mereka tidak boleh merugikan satu sama lain dan harus menunjukkan keadilan dan kebaikan dalam hubungan mereka.⁷¹

Berbicara mengenai keadilan dalam pengupahan, adil memiliki dua makna yang menjadi ukuran bagaimana dapat dikatakan adil, yaitu:

1. Adil bermakna jelas dan transparan

yaitu prinsip utama dari keadilan terletak pada kejelasan akad atau perjanjian antar kedua belah pihak dan berkomitmen dalam melakukannya. Dalam praktiknya di Kelurahan Jawi-jawi pemilik sawah sebelum mempekerjakan buruh panen mereka akan melakukan pertemuan terlebih dahulu untuk melakukan perjanjian.

Lismawati (pemilik sawah):

“saya kerumahnya buruh mappanggil untuk potongkan padiku, saya bicarakan waktunya dan dimana tempatnya kalo masalah upah sudah jelas mi selalu dua kaleng atau dua baskom perhari”⁷²

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa sebelum mempekerjakan para buruh mereka sudah melakukan pertemuan untuk membicarakan atau melakukan

⁷⁰Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 20.

⁷¹Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 198.

⁷²Wawancara Pemilik Sawah, Lismawati (30 Tahun), Bulukumba, Kelurahan Jawi-jawi, 8 Desember 2019

perjanjian mengenai waktu dan tempat mereka mempekerjakan buruh sedangkan mengenai upah mereka sudah paham bahwa yang berlaku didaerah tersebut adalah sistem harian. Dengan perjanjian antara kedua belah pihak yang artinya mereka berkomitmen bahwa mereka memiliki tanggung jawab masing-masing, bahwa seorang buruh memiliki kewajiban untuk memanen padi para pemilik dan begitupun dengan para pemilik mereka memiliki kewajiban untuk membayarkan upah pekerja secara amanah tanpa saling merugikan satu sama lain. Namun mengenai pengupahannya tidak dijelaskan secara rinci pada saat pelaksanaan akad karena didaerah tersebut telah menganut sistem pengupahan yang turun temurun atau telah menjadi kebiasaan masyarakat dan seakan-akan mereka telah sama-sama paham tentang berapa upah yang akan diterima kelak.

Dalam memperlakukan setiap orang secara adil sepatutnya menjadi keharusan tidak hanya dalam hal pengupahan saja, tetapi juga dalam hal lainnya seperti dalam perekrutan pekerja, promosi jabatan dan keputusan-keputusan lainnya dalam suatu pekerjaan. Kejujuran dan keadilan merupakan sebuah keharusan, seperti yang terdapat dalam Qs. An-Nisa': 4/58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Syaikh Dr. M. Sulaiman Al-Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam

Madinah menafsirkan bahwa ayat diatas memerintahkan kepada manusia untuk

memberikan amanat itu kepada ahlinya (yaitu setiap sesuatu yang diamanatkan seseorang yang merupakan hak orang lain, baik amanat yang diperuntukkan untuk Allah atau para hamba, dan juga dalam menentukan hukum diantara manusia harus diputuskan dengan adil sesuai kebenaran yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadits.

Maksud dari ayat diatas bahwa Allah memerintahkan agar kita menunaikan amanat dan disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya, dan janganlah melalaikan amanat itu. Dan Allah memerintahkan untuk memutuskan perkara diantara manusia dengan dasar keadilan dan bersifat obyektif. seperti halnya dalam pengupahan dimana para pemberi kerja berkewajiban untuk memberi hak para pekerja berupa upah yang harus dibayarkan dengan prinsip keadilan karna sesungguhnya Allah mengetahui setiap apa yang kita kerjakan.

2. Adil bermakna proporsional

Maksud dari proporsional yaitu bahwa upah hendaklah sesuai dengan kadar kerja atau hasil produksi yang dilakukan oleh para buruh panen dan dilarang adanya eksploitasi dalam pengupahan tersebut. Sebab tenaga kerja merupakan faktor utama dalam sebuah produksi, jadi selayaknya para buruh memperoleh imbalan atau upah yang lebih manusiawi.⁷³

Halija (Buruh panen padi):

“Saya kalau kerja seharian saya dikasi dua baskom padi tapi kalo misalnya saya Cuma kerja setengah hari atau Cuma sampai jam 12 cuma dikasi upah

⁷³Muhammad Fauroni R. Lukman, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 175.

satu baskom, kalo masalah makanan itu ditanggung sama yang punya sawah cuman kalo alat yang kupake potong padi kita bawa sendiri”⁷⁴

Berdasarkan wawancara diatas bahwa para buruh panen padi mendapatkan upah berdasarkan lamanya ia bekerja jika dia bekerja seharian maka upahnya akan diberi full dua baskom tetapi jika hanya setengah hari maka hanya satu baskom. Selain upah yang didapatkan berupa padi, para pemilik sawah juga menjamin makanan yang dikonsumsi para buruh namun segala alat yang digunakan dalam pekerjaannya tetap dibawa oleh buruh atau tidak ditanggung pemilik sawah.

Harmina (buruh panen padi):

Biasa ada dikasiki upah yang tidak sesuai, saya juga pernah panen padinya orang selama dua hari baru selesai, pas datang upahku, saya jemur baru saya pabrik ternyata sedikit jadinya, bisa dibilang itu upah samaji kalo kerjaka satu hari diorang lain. Padahal saya juga tau waktu saya panen ini padi bagusji, coba gagal panenki iya bisaji dimaklumi tapi itu tidak”⁷⁵

Berdasarkan pernyataan dari wawancara diatas mengatakan bahwa seringkali seorang buruh mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan, adanya seorang pemilik yang memberi upah tidak melihat dari kadar kerja buruh dan hasil panen. Sehingga buruh merasa kecewa dengan upah yang mereka terima, padahal mereka melihat bahwa panen tersebut tidak teralalu mengalami kegagalan sehingga tidak sepatutnya mereka menerima upah seperti itu.

⁷⁴Wawancara Buruh Panen, Halija (57 Tahun), Bulukumba, Kelurahan Jawi-jawi, 8 Desember 2019

⁷⁵Wawancara Buruh Panen, Harmina (44Tahun), Bulukumba, Kelurahan Jawi-jawi, 8 Desember 2019.

Prinsip keadilan dalam Islam juga terdapat dalam firman Allah Qs. Al-Jaatsiyah: 45/22 yang berbunyi sebagai berikut:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ



Terjemahnya:

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.

Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili yaitu seorang pakar fikih dan tafsir negeri Suriah mengatakan bahwa dari ayat diatas penciptaan langit dan bumi itu dimaksud untuk menunjukkan kekuasaan dan keesaan-Nya. Dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya yaitu kemaksiatan dan ketaatan yang dilakukannya, maka tidaklah sama balasan yang diterima orang kafir dan orang mukmin (dan mereka tidak akan dirugikan).

Ayat diatas menjelaskan tentang upah yang layak kepada setiap buruh atau pekerja sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Jika adanya pengurangan dalam upah mereka tanpa adanya sebab seperti berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat tersebut memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kadar kerjanya atau hasil produksinya dan itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.

Berlaku adil sangat terkait dengan hak yang dimiliki seseorang, wajib diperlakukan dengan adil. segala hak dan kewajiban mereka terkait pula dengan

amanah, sementara amanah wajib disampaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, segala hukum yang berdasarkan amanah harus diterapkan secara adil, tanpa diikuti dengan rasa kebencian dan segala sifat yang negatif lainnya. Dalam pengertian lain mengharuskan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajibannya yang harus dikerjakannya, dikarenakan prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dengan prinsip keadilan dan moralitas.⁷⁶

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada Para buruh panen padi di Kelurahan Jawi-jawi, mereka mengatakan bahwa sistem pengupahan tersebut sudah berlaku sejak lama. Dalam pemberian upah yaitu berupa padi yang akan mereka olah kemudian akan di konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari

Juharni (buruh panen padi):

“kalau yang namanya keadilan disini dek susah sekali mau didapat karena begitumi, tidak sama semua orang. Biasanya ada pemilik sawah asal makkasiji saja upah yang penting selesaimi tanggung jawabnya, biasa kita kerja full sehari, pas datang upahta diliat ternyata lebih banyak kulitnya dari isinya. Tapi maumi diapa berusaha mami di ihklaskan”⁷⁷

Dari pernyataan diatas bahwa didalam pemberian upah kepada buruh tidak menutup kemungkinan akan terjadinya ketidakadilan yang dilakukan oleh para pemilik sawah, baik itu disengaja maupun tidak, seperti dalam pemberian upah dua baskom padi yang dilakukan, seharusnya para pemberi upah memperkirakan dengan baik bahwa upah yang diberi sudah sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan buruh, upah yang diberikan harus seimbang jangan sampai terlalu

⁷⁶Armansyah Waliam, “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perpekstif Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 5, No. 2, 2017, h. 270.

⁷⁷Wawancara Buruh Panen, Juharni (43Tahun), Bulukumba, Kelurahan Jawi-jawi, 8 Desember 2019.

banyak ampas daripada padi yang berisi beras, sebab ketika padi tersebut telah dipabrik maka akan terjadinya penyusutan. Karna tentunya pemilik sawah lebih paham dalam memperkirakan upah yang mereka berikan sudah sesuai atau belum.

Dalam al-Qur'an dijelaskan larangan melakukan ketidakadilan dan eksploitasi yang didesain untuk melindungi hak setiap individu dalam masyarakat (baik konsumen maupun produsen dan distributor, baik pekerja maupun yang mempekerjakan, juga untuk memajukan kesejahteraan umum yang merupakan tujuan utama Islam. diantara hal yang penting dalam hal ini adalah hubungan antara majikan dengan pekerja dimana islam menempatkannya dalam hubungan yang tepat. Juga memberi aturan terhadap hubungan timbal balik keduanya untuk mewujudkan keadilan diantara mereka. para pekerja berhak mendapat upah yang adil atas konstribusinya terhadap keluaran, dan adalah berlawanan dengan hukum bagi seorang majikan muslim untuk mengeksploitasi pekerjaannya.⁷⁸

Adapun asas-asas hukum yang harus diperhatikan dalam sistem pengupahan yang berkeadilan yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas upah lahir setelah adanya hubungan kerja dan berakhir bila hubungan kerja berakhir

Berdasarkan apa yang terjadi di Kelurahan jawi-jawi bahwa hak dan kewajiban antara pemilik sawah dan buruh ada setelah adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. Maka para buruh berkewajiban untuk melakukan tugasnya memanen padi pemilik sehingga akan diberikan haknya berupa upah yang akan dibayarkan sesuai kesepakatan.

⁷⁸Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana,2015), h. 74.

b. Upah terdiri dari beberapa komponen yang harus dirinci secara jelas

Sistem pengupahan tersebut telah berlansung sejak lama dan menjadi kebiasaan masyarakat secara umum, tanpa membahas secara rinci mengenai upah yang akan diberikan. Mereka sudah sama-sama mengetahui sistem upah yang digunakan yaitu dengan memberikan padi dengan perhitungan dua baskom perhari, dan makanan yang dikonsumsi akan ditanggung oleh pemilik sawah.

c. Pemberian upah harus manusiawi

Pemberian upah dalam hal ini maknanya adalah besarnya upah dan cara pembayaran upah haruslah menghargai pekerja sebagai manusia yang punya hak hidup secara layak. Besarnya upah harus sesuai dengan upah yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja minimal layak untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dalam prakteknya di Kelurahan Jawi-jawi, sistem pengupahan seperti ini dapat dikatakan layak untuk memenuhi kebutuhan pokok namun tidak untuk waktu yang lama karena mengingat tingkat upah yang dapat terbilang rendah, namun hal tersebut sesuai dengan kadar kerja buruh dan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat di daerah tersebut.

d. Tidak boleh ada diskriminasi upah

Diskriminasi dilarang karena setiap diskriminasi akan menimbulkan rasa cemburu, iri, dan tidak harmonisnya hubungan sesama orang yang mempunyai kesempatan yang sama. Seperti halnya sistem pengupahan yang diterapkan di Kelurahan Jawi-jawi, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya diskriminasi upah sebab sistem pengupahan tersebut mengandung unsur ketidakjelasan akan kuantitas upah yang diterima antara buruh yang satu dengan lainnya. Bisa saja

akan ada buruh yang merasa kecewa dengan upah yang diterima, karena ia merasa upah yang ia terima tidak sepadan dengan tenaga yang ia keluarkan. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam Qs. as-Syu'ara: 42/183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”

Tafsir Al- Wajiz, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah menafsirkan bahwa ayat diatas menjelaskan bahwa janganlah sesama manusia saling merugikan seperti mengurangi hak atau harta mereka dan mengambilnya dengan mengurangi takaran dan timbangan, dan keruskan lainnya.

Maksud dari ayat diatas juga menjelaskan bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh mereka. Dalam pengertian yang lebih jauh bahwa segala hak dalam pengupahan janganlah dibayarkan jauh dibawah upah yang biasanya diberikan karna akan terjadinya ketidakadilan sehingga akan menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak.

Keadilan dalam pemberian upah juga harus diperhatikan mengenai kelayakannya. Maksud dari kelayakan disini dapat dilihat dari:

pertama, layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan. Dalam praktek pengupahan di Kelurahan Jawi-jawi belum bisa dikatakan layak dari segi tersebut karna upah yang mereka terima hanya cukup untuk mereka konsumsi

sebagai kebutuhan pangan tapi tidak untuk memenuhi kebutuhan sandang dan papan mereka.

kedua, layak bermakna telah sesuai dengan pasaran. Jangan sampai terjadinya kecurangan terhadap buruh dengan cara mengurangi hak-hak yang sepatutnya mereka terima ataupun dengan mempekerjakan buruh jauh dibawah upah yang biasanya diberikan. Dalam praktiknya di Kelurahan Jawi-jawi, Sistem pengupahan serta besarnya sebuah upah yang diberikan berdasarkan dengan melihat apa yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat sehingga pemilik sawah tidak secara sembarangan sesuka hati dalam memberikan upahnya. Kedua belah pihak sebelum melakukan perjanjian untuk kerja sama sudah mengetahui satu sama lain besaran upahnya yang ada pada pasaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

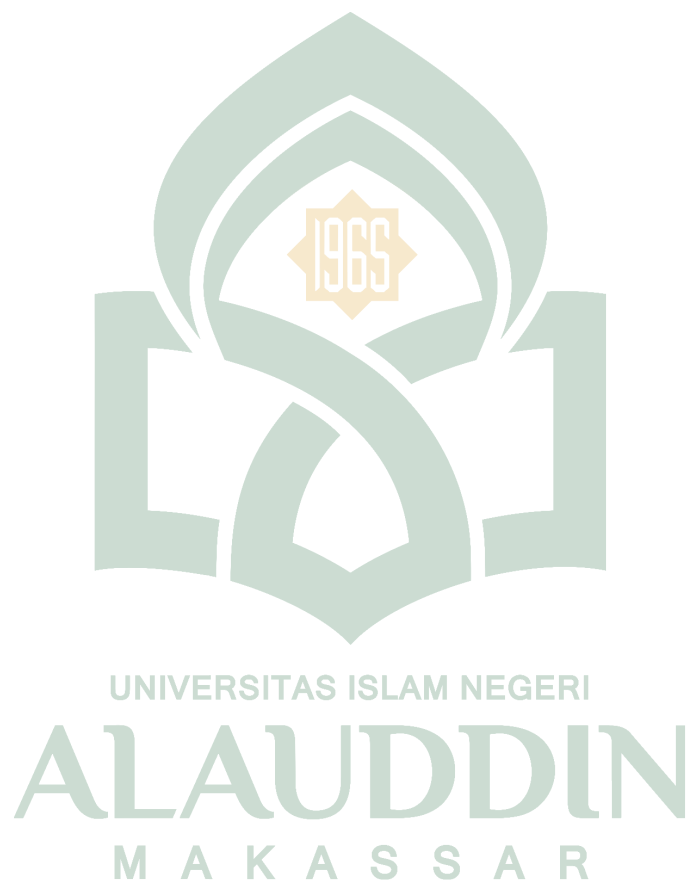
Setelah penulis melakukan penelitian di lapangan dengan wawancara kepada pemilik sawah dan buruh panen, penulis dapat menyimpulkan:

1. Mekanisme pengupahan yang dilakukan di Kelurahan Jawi-jawi yaitu dengan memberi padi kepada buruh diakhir panen dan banyaknya upah dihitung dengan sistem harian.
2. Sistem ini belum bisa dikatakan masalah karena adanya indikator yang belum terpenuhi yaitu pengupahan tersebut masih mengandung unsur menduga-duga dalam kuantitas upah yang diberikan.
3. Sistem pengupahan di Kelurahan Jawi-jawi belum dapat dikatakan adil sepenuhnya karena indikatornya belum terpenuhi sepenuhnya yaitu kadang kala ada yang semena-mena memberi tanpa mempertimbangkan besarnya tenaga yang dikeluarkan buruh atau mereka memberi upah sekedar melepas tanggung jawab saja dan hal ini tidak adil dalam hal proporsional.

B. Saran

Masalah pengupahan akan selalu ada, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya ketidakadilan yang akan merugikan salah satu pihak, maka perlu adanya kesadaran masing-masing baik dari pihak pemilik sawah maupun buruh. Dengan kesadaran pemilik yang tidak semena-mena dalam memberikan upah yang tentunya harus memperhatikan dengan betul-betul kelayakan upah tersebut jangan sampai akan terjadi kerugian atau adanya pihak yang terdzalimi. Begitupun

dengan para buruh, mereka harus melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sehingga upah yang mereka peroleh dapat diakatakan sepadan dengan tenaga yang mereka keluarkan dan perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan mengenai pengupahan dari lembaga-lembaga pertanian sehingga masyarakat yang kurang paham mengenai pengupahan yang layak akan tau dan bisa menerapkannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan. 2018 “Al- Maslahah dalam Penentuan Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismai. 2011. *Ensiklopedia Hadits 1; Shahih Al-Bukhari 1*. Jakarta: Almahira.
- Al-Bukhari. 2004. *Sahih Al-Bukhari*, Juz II. Bandung: Pustaka Setia.
- Al Hadi. 2017. Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*,. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Fahlefi, Rizal. 2015. “Implementasi Maslahah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah”. *JURIS*, VOL. 14, No. 2.
- FORDEBI ADESI. 2016. *Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, Isnaini. 2015. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Hendrastomo, Grendi. 2010. “Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh Diantara Kepentingan Negara dan Korporasi”. *Jurnal Informasi*, Vol. 16, No.2.
- Hermanto, Agus. 2017. “Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Thufi Dan Al-Ghazali). *AL- ‘ADALAH*, Vol. 14, No. 2.
- Hidayati, Ika Novi Nur. 2017. “Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Az Zarga’*. Vol. 9, No. 2.
- Ilyas, Rahmat. 2015. “Konsep Maslahah Dalam Komsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1, No.1.
- Iswandi, Andi. 2014. “Maslahat Memelihara Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam”. *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*.
- Krisnarini, Dwi Krisnarini, dkk. 2008. “Analisa Upah dan Kesejahteraan Pekerja Industri Kecil Menengah Pakaian Jeans XYZ di Pondok Aren, Tangerang”. *Jurnal MPI*, Vol. 3, No. 2.
- Lestari, Novi Ayu. 2017. “Upah Tenaga Kerja Lepas Kebun Sawit Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Desa Pasar Kembang Kab. Indragigi Hilir)”. *Jurnal syari’ah*, Vol. 5, No. 2.

- Lukman, Muhammad Fauroni R. 2002. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Mardiah Nur. 2018. "Islam dan Perburuhan: Pembagian Kerja, *Safety Networking* dan Masalah Pada Sistem Pengupahan di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 9, No. 2.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mujahidin, Akhmad. 2013. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ni'am, M. Dilif Lailun. 2018. "Pengaruh Upah Terhadap Motivasi Kerja Karyawan (Studi Kasus Pada Karyawan UD. Pakem Sari, Desa Sumberpakem, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember)". *Jurnal Pendidikan ekonomi*, Vol. 12, No. 2.
- Nisa, Yuni Hidayatun. 2019. "Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani (Studi Kasus Dusun Mandigu Desa Suco Kabupaten Jember)". *Jurnal Istiqro*, Vol. 5, No. 1.
- Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- pasaribu, Muksana. 2014. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penentuan Hukum Islam". *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 4.
- Rozalinda. 2016. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Harun. 2015. "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2.
- Saprida. 2018. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa. Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 5, No. 1.
- Sari, Septi Wulan. 2016. "Pemberian Upah Pekerja Ditinjau Dari Upah Minimum Kabupaten Dan Hukum Ekonomi Islam". *AHKAM*, Vol. 4, No. 1.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2018. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaikh, Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Aluzy. 2015. *Tafsir Al-Muyassar Jilid 3*, Solo: Mujamma' al-malik Fahd Li Thiba'atil Mushhaf asy-syarif.
- Wahyuni, Dwi. 2016. "Analisis Sistem Pengupahan "Bawon" Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Petani di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi

- Kabupaten Blitar)”. *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan*, Vol. 2, No. 2.
- Waliam, Armansyah. 2017. “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perpekstif Islam”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 5, No. 2.
- Yetniwati. 2017. “Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan”. *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1.
- Zainal, Vethzal Rivai. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.



LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan untuk Petani Padi (Pemilik Sawah)

1. Bagaimana mengontrak buruh panen padi?
2. Ada berapa macam pekerjaan buruh panen padi dan bagaimana pelaksanaannya?
3. Ada berapa bentuk/macam dan jumlah upah yang dibayarkan?
4. Siapakah yang menentukan upah?
5. Apa yang menjadi landasan pembayaran upah?
6. Kapan pembayaran upah dilaksanakan?
7. Apakah ada imbalan selain upah, jika ada. Apa bentuknya?
8. Apabila ada kerja tambahan (ekstra) apakah diberikan upah tambahan?
9. Apa biaya upah tersebut sudah seimbang (adil) menurut anda?
10. Apakah saudara merasa dirugikan oleh buruh, kalau merasa dirugikan dalam hal bagaimana dan langkah apa yang akan dilakukan?

B. Pertanyaan untuk Para Buruh Panen Padi.

1. Mengapa saudara memilih pekerjaan sebagai buruh panen padi?
2. Apakah pekerjaan tersebut menggunakan alat? dan apabila menggunakan alat, siapa yang menyediakan alat tersebut?
3. Bagaimana sistem upah panen padi yang sudah berjalan selama ini di Kelurahan Jawi-jawi yang bapak amati?
4. Kapan pembayaran upah dilaksanakan?
5. Siapa yang menetapkan upah?
6. Upah jenis apa yang saudara terima?

7. Berapa upah yang saudara terima?
8. Apakah ada imbalan lain selain upah?
9. Apakah upah tersebut sudah seimbang (adil) menurut anda?
10. Apakah petani selalu melaksanakan kewajibannya membayar upah?
11. Apakah tidak ada perasaan dirugikan oleh petani, kalau merasa dirugikan dalam hal bagaimana dan langkah apa yang saudara akan lakukan?
12. Apakah dengan upah yang biasa anda dapatkan sudah cukup atau mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari?





Gambar 1: Wawancara dengan pemilik sawah (bapak Sudirman, 40 tahun)



Gambar 2: Wawancara dengan pemilik sawah (ibu Lismawati 30 tahun)



Gambar 3: Wawancara dengan buruh panen (ibu Juharni 43 tahun)



Gambar 4: Wawancara dengan buruh panen (ibu Harmina 44 tahun)



Gambar 5: Wawancara dengan buruh panen (ibu Erna 44 tahun)



Gambar 6: Wawancara dengan buruh panen (ibu Halija 57 tahun)



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Dr. Sutomo No.4 Telp. (0413) 85003 Bulukumba 92511

Bulukumba, 02 Desember, 2019

Nomor: 070/
Sifat: Biasa
Lampiran: -
Perihal: Rekomendasi

Kepada
Yth Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kab Bulukumba
di
Bulukumba

Berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2512/S.01/PTSP/2019 tanggal 12 Nopember 2019 Perihal Izin Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu/Saudara (i) bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : JUSMUNANDAR
Tgl Lahir : Kampung Baru, 02 - 02 - 1998
No Pokok : 90100115113
Program Studi : Ekonomi Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Alauddin Makassar
Alamat : Jl. Kumala 2 Selatan Makassar
Hp : 082394 265 462

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Camat Bulukumba dan Lurah Jawi - Jawi Kabupaten Bulukumba dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul :

"SISTEM UPAH BURUH PANEN PADI DALAM PERSPEKTIF KEMASLAHATAN DAN KEADILAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN JAWI - JAWI KECAMATAN BULUKUMBA KABUPATEN BULUKUMBA SULAWESI SELATAN)".

Selama : Tmt. 18 Nopember s/d 18 Desember 2019
Pengikut/Ang Team : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dianggap layak mendapatkan Surat Keterangan Penelitian

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dapat melakukan hal tersebut diatas

UNIVERSITAS ALAUDDIN NEGERI

MAKASSAR



AHMAD ARFAN, S.I.P, MT
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19721212 199202 1 00

Tembusan :

1. Bupati Bulukumba (sebagai laporan)
2. FKPD Kabupaten Bulukumba
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Makassar
4. Peringgal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Jusmunandar, lahir pada tanggal 02 Februari 1998 di kampung Baru Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, merupakan anak bungsu dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Jumadda dan Ibu Saenab. Tahun 2003 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri 278 Pakombong, kemudian pada tahun 2009 melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri 410

Tanete dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Tanete dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 lanjut ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), di fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam melalui jalur UMM, dan Penulis menyelesaikan studi pada tahun 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R